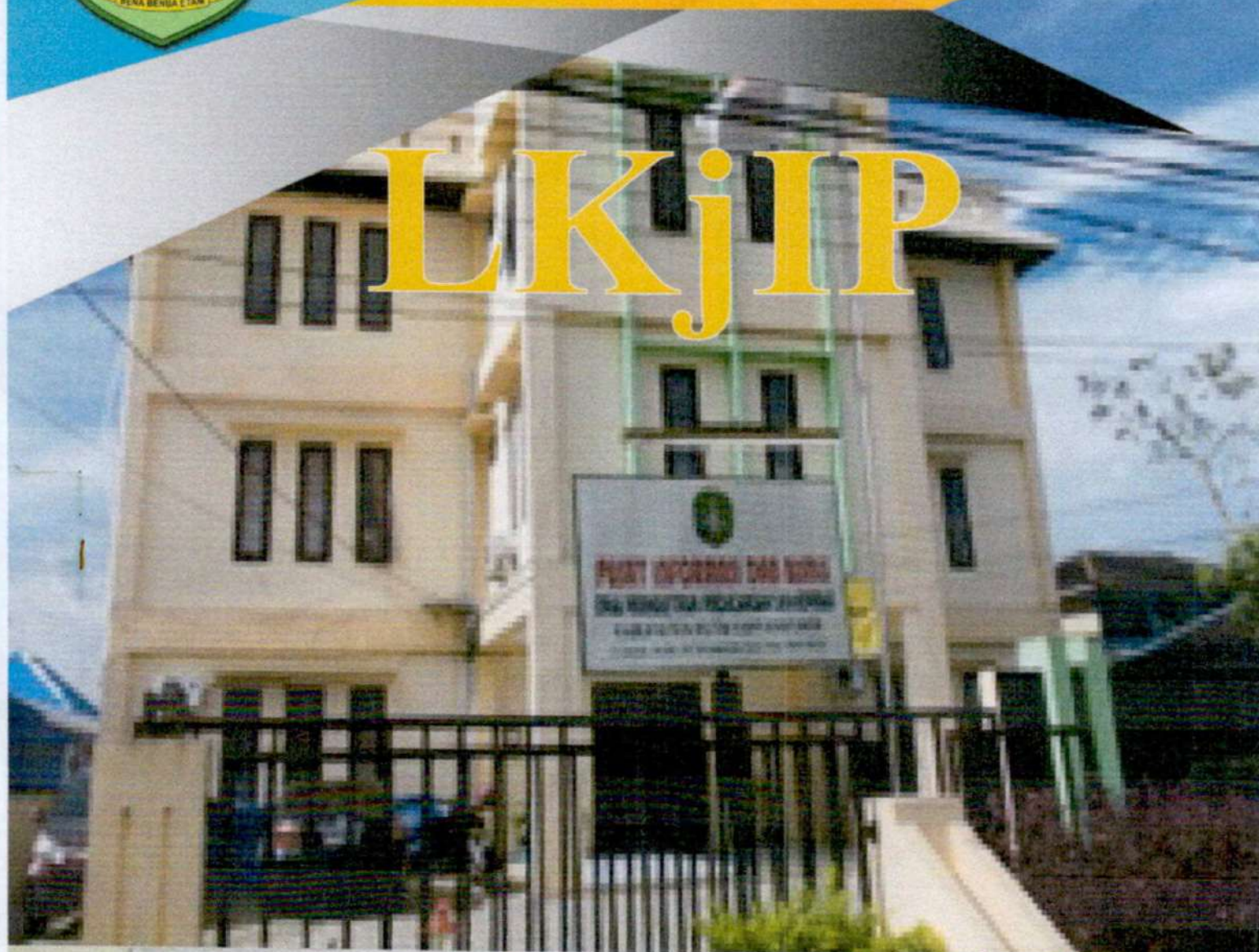




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TAHUN 202



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) "DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019" yang merupakan tahun ke 4 (Keempat) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) tahun 2016-2021.

Penyusunan LKjIP ini perwujudan bentuk tanggung jawab dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan misi organisasi yang menyajikan capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan baik yang sudah ataupun belum tercapai pada Tahun Anggaran 2020, Dan sepenuhnya mengacu pada RENSTRA Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 2016-2021. Ini juga merupakan bentuk transparansi, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dan berharap Kritik, saran, semua pihak atas tersusunnya Laporan ini sebagai salah satu masukan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari sisi aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya;

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartaengara Tahun 2020 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Tenggarong, Februari 2021

Kepala Dinas

Drs. Tajuddin

Pembina Utama Muda

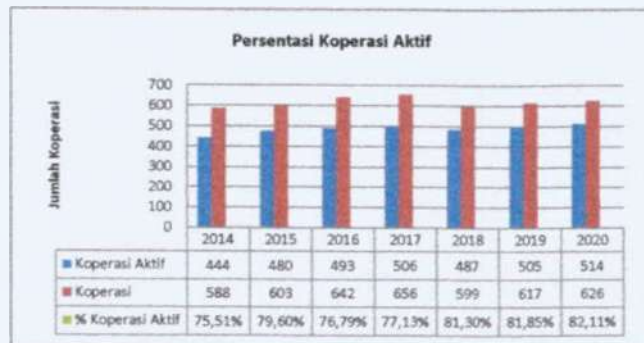
NIP. 19640405 198603 1 036

No	Nama	Jabatan	Verifikasi
1	Hj Ismi Nurul Huda SP, MM	Sekretaris	
2	Samijan, SE	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
3	Asdian, SE	Kabid Pemberdayaan Koperasi	
4	Dianto Raharjo, SP MP	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	Endri.R	Kasub Penyusunan Program,Keu	



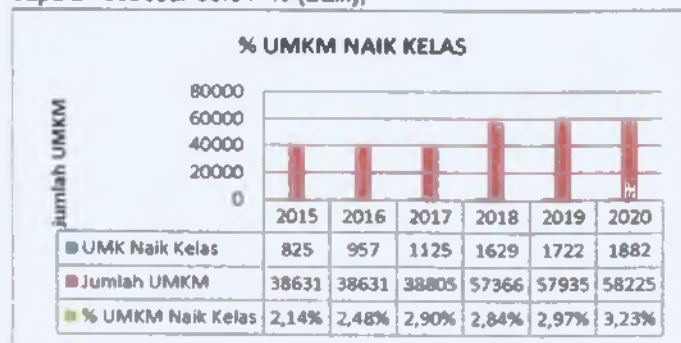
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang sebelumnya disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Permenpanrb Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Selanjutnya untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian target indikator kinerja utama dilakukan dengan metode skala ordinal yang memberikan kriteria atas capaian kinerja berdasarkan persentase capaian pada setiap indikator kinerja. Metode pengukuran sebagaimana dijelaskan pada BAB III. Untuk Tahun 2020 ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai

Kartanegara melakukan pengukuran pada 2 sasaran strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama diantaranya Persentase Koperasi Aktif dari target 81,43 %. Realisasi sebesar 82,11 % (Sangat Baik). dan target UMK Naik Kelas tahun 2020 sebesar 3,24 %. Realisasi sebesar 3,23 % atau diukur tingkat capaian sebesar 99.84 % (Baik);



Kemudian bila dilihat dari laporan keuangan tahun 2020 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 5,562,891,048.00, Realisasikan sebesar Rp. 4,283,917,794.00 atau 77,01 %, sehingga apabila dibandingkan dengan persentase kinerja dan keuangan tadi maka dikategorikan EFISIEN.

Kemudian sebagai bentuk evaluasi atas kinerja dan indikator kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan reviu berjalan pada tahun 2020, maka penetapan kinerja nantinya disesuaikan dengan perubahan pada RPJMD dalam rangka menyelaraskan indikator kinerja OPD penanggung jawab indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian ikhtisar ini dibuat sebagai pengantar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja yang kami susun.

Tenggarong, Februari 2020,
Kepala Dinas,

Drs. Tajuddin

Pembina Utama Muda

NIP. 19640405 198603 1 036

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hj Ismi Nurul Huda SP, MM		
2	Semijan, SE	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
3	Asdian, SE	Kabid Pemberdayaan Koperasi	
4	Dianto Raharjo, SP MP	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	Endri R.	Kasub Program, Keu	



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum, Tusi dan Struktur Organisasi	3
C. Isu-Isu Strategis	6
D. Sistematika Penyajian	7
E. Maksud dan Tujuan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja	13
D Alokasi Anggaran Tahun 2020	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya	16
B. Capaian Kinerja Organisasi	16
- Realisasi Indikator Kinerja Utama	
- Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini dengan tahun lalu	
- Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	
C. Analisis Capaian Kinerja	18
D. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Realisasi Anggaran	
4. Tingkat Efektifitas Anggaran Per Sasaran Diskopukm Tahun 2020	
5. Tingkat Efektifitas Anggaran Per Kegiatan Diskopukm Tahun 2020	



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Komposisi SDM Diskop UKM Kab. Kutai Kartanegara	5
1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	6
1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan	6
1.4 Data Pejabat Struktural yang Memenuhi	6
2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskop UKM	11
2.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2020	14
2.4 Rincian Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	14
2.5 Rincian Alokasi Anggaran Belanja Langsung	15
2.6 Rincian Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	15
3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020	17
3.2 Realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	17
3.3 Realisasi capaian kinerja tahun ini dengan Target Jangka Menengah	18
3.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	18
3.5 Persentasi Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM	19
3.6 Sebaran Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara	19
3.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2, Meningkatnya Produktifitas Usaha Mikro	24
3.8 Tabel UMKM Naik Kelas	24
3.9 Perkembangan UMKM Sesuai Klasifikasi Usaha	25
3.10 Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara	26
3.11 Analisa Capaian Kinerja Sasaran : Meningkatnya Wlrausaha Baru	28
3.12 Analisa Capaian Kinerja Sasaran : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM	32
3.11 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020	33
3.12 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020	34



BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Gambaran Umum serta perkembangan, kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu juga dijelaskan Sistematika dan ruang lingkup laporan.

A. Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94) yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM;

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdasar prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (good governance) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 ini disusun berdasarkan perangkat-perangkat hukum sebagai berikut :

- Sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan tentang laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Mendagri dengan tembusan kepada Gubernur, bagi Kepala Daerah Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang



Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) LAN sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah, antara lain :
 - Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran, merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur *Rencana Strategik (Renstra)*.
 - Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur *Rencana Strategis (Renstra)*.Dalam kaitannya dengan Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan merupakan basis utama dalam mengukur kinerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas pengelolaan sumberdaya secara keseluruhan.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten



Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Disamping sebagai bentuk ketanggapan terhadap Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga merupakan upaya menciptakan keterbukaan (*transparency*) sebagai landasan dalam menyampaikan pertanggungjawaban (*Akuntabilitas*).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasainya, dalam rangka mencapai tujuan, melalui suatu media berupa laporan kinerja secara periodik. Sumber daya merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Sumber daya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dapat berupa, aparat pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, kekuasaan hukum/peraturan.

Media pertanggungjawaban dalam konsep ini tidak terbatas pada laporan saja, tetapi juga mencakup praktek-praktek kemudahan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

B. Gambaran Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Gambaran Umum

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

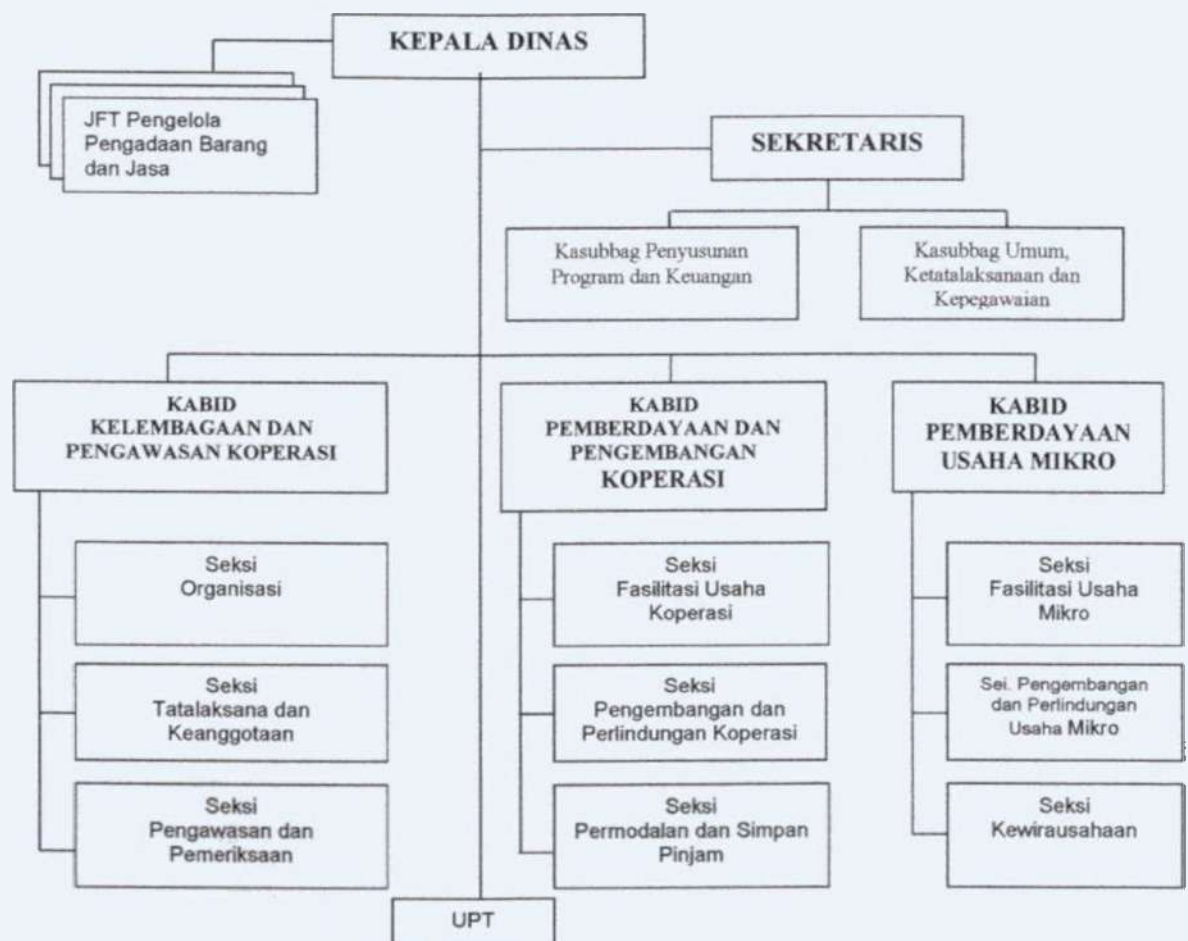


5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

1. Kepala Dinas:
2. Sekretaris terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan;
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi :
 - 1) Seksi Organisasi
 - 2) Seksi Tatalaksana dan Keanggotaan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi:
 - 1) Seksi Fasilitas Usaha Koperasi
 - 2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi';
 - 3) Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam;
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - 1) Seksi Fasilitas Usaha Mikro;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - 3) Seksi Kewirausahaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional :





Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Perbup Nomor 5 Tahun 2019)

e. Sumber Daya Manusia

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain. Sehingga permasalahan maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan memanfaatkan potensi-potensi dalam pelaksanaan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berwawasan. Kekuatan sumber daya manusia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berjumlah 111 orang untuk ASN 76 orang dengan perincian Pejabat Struktural 16 orang, Staf 60 orang, dan Non ASN/THL 35 orang yang terdiri dari :

Laki-laki : 54 orang

Perempuan : 57 orang

Total Asn/Non Asn : 111 orang

Jumlah Pejabat Struktural

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 11 orang

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Status Kepegawaian	BIDANG					
		Sekretariat	Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi	Pemberdayaan Usaha Mikro	JFT	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASN	23	17	20	16	0	76
	THL	16	15	2	2	0	35
Jumlah Perbidang ASN		39	39	32	22	18	111

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	S-3																	0
2	S-2	6	2					1	1									10
3	S-1	2		1			4	5	17									29
4	Diploma																	0
5	SD/SLTP/SLTA									1	1	23	11				1	37
Jumlah		8	2	1	0	0	4	6	18	1	1	23	11	0	0	0	1	76

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Data	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	8	2	1	0	0	4	6	18	1	1	23	11	0	0	0	1	76
		11				28				36				1				76 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.4
Data Pejabat Struktural yang Memenuhi
Persyaratan Diklat PIM

NO	KUALIFIKASI DIKLAT PIM	ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Sudah Diklat PIM	1	1	3	7	12
2	Lulus Tes	-	-	-	-	0
3	Belum Tes	-	-	-	4	2
JUMLAH		1	1	3	11	16 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

C. Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu disusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada. Dengan demikian maka seluruh faktor akan ditempatkan dalam suatu kerangka yang saling terkait satu sama lain.

Permasalahan yang dihadapi kedepan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :



- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
- b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
- c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
- d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
- e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
- f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
- g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
- h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- j. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- k. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi KUMKM.
- l. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- m. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Selain itu juga dipaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara serta uraian singkat mengenai tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (gambaran umum tugas pokok dan fungsi).

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2020 dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya;

Bab IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

E. Maksud Dan Tujuan

Disamping dalam rangka mewujudkan transparansi sebagai landasan dalam menyampaikan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai Evaluasi Kinerja Tahunan Dinas dalam melaksanakan program-programnya. Evaluasi Kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara bagaimana mencapainya. Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan dituangkan dalam bentuk tabel Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Kinerja.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020 atau selama periode 2016 sd 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh. Dan Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada visi dan misi dan pelaksanaan sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai;
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat uraian mengenai rencana strategis (Renstra), kebijakan dan program, rencana kegiatan tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk mengukur kinerja maka indikator Kinerja Utama diambil dari RPJMD Tahun 2016-2021 Pemerintah



Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pada bagian akhir akan disajikan Perjanjian Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020.

A. Perencanaan Strategis

Dinas Koperasi dan UKM salah satu Perangkat Daerah yang menjalankan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”**

Visi diatas diarahkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan



perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan lima tahun mendatang, yaitu **Maju, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan.**

Upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, maka Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
2. Tujuan Kedua : Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan.
3. Tujuan Ketiga : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.



Tabel 2.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77,79%	79,76 %	85,86%	86,36 %	86,86 %
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	2%	2%	2%	2%	2%
			Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	84%	84%	84%	84%	84%
			Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	-	-	5%	5%	6%
			Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	-	-	280	300	500
3.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	81,13%	81,23%	81,33%	81,43%	81,53%
			Pertumbuhan Koperasi	621	640	0	0	0
			Jumlah Koperasi aktif	503	519	0	0	0
			Cakupan Koperasi Melakukan RAT	144	109	115	120	125
			Cakupan Koperasi Berprestasi	5%	5%	5%	5%	5%
			Cakupan Bina Koperasi	311	320	329	339	350
			Cakupan Bina UMKM	11.508	13.152	14.796	16.440	18.084
			Jumlah Kemitraan Koperasi	25	30	35	40	50
		Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase UMKM yang Naik Kelas	2,33%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%
			Pertumbuhan UMKM Tani dan Nelayan	200	500	800	1.100	1.400
			Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	41.031	43.431	44.931	46.431	47.931
			Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1.953	2.153	2.353	2.553	2.753
			Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	957	1.125	1.325	1.525	1.725
			Pertumbuhan Aset Usaha Mikro	957	1.125	1.325	1.525	1.725



Berdasarkan Visi Misi Tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka dapat dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM :

A. Program Pendukung (Generik) :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Urusan Koperasi dan UKM

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM.
3. Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Usaha Kecil Menengah.

B, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU, Key Performance Indicators) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini, sebaiknya mengikuti metode SMART, yaitu:

1. Specific, yang artinya bahwa target haruslah spesifik, detail dan fokus;
2. Measurable, yang artinya dapat diukur;
3. Achievable, yang artinya realistis dan dapat dicapai;
4. Relevant, yang artinya relevan dan berkaitan dengan tugas pokok; dan
5. Time, yang artinya waktu untuk mencapai target tersebut dapat diquantifikasi.

Selanjutnya melalui Indikator Kinerja Utama inilah dilaksanakan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah I, Indikator Kinerja Utama nya adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET AKHIR 2016-2021	PENJELASAN
Prosentase Koperasi Aktif	%	81,43	81,53	Untuk mengukur berapa jumlah Koperasi Aktif di bandingkan dengan jumlah seluruh Koperasi
Prosentase UMKM yang naik kelas	%	3,28	3,60	Untuk mengetahui berapa UMKM yang naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil

Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 dan Target Perjanjian Kinerja

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

“ Perjanjian Kinerja adalah Komitmen Pimpinan dalam tekad dan janji untuk berkinerja dalam satu tahun tertentu “



Dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2020 telah membuat Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2016-2021 sebagaimana terdapat pada lampiran 1.



D. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun 2020 dialokasikan dana dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 8,556,727,693.67 dan belanja Lansung sebesar Rp 5,562,891,048.00 atau dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 8,556,727,693.67
2	Belanja Langsung	Rp. 5,562,891,048.00
Total Alokasi Tahun 2020		Rp. 14.119.618.741,67

Tabel 2.4
Rincian Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

REKENING	URAIAN	Pagu Anggaran
511	Belanja Pegawai	8.556.727.693,67
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.464.348.936,67
5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.237.506.925,45
5110102	Tunjangan Keluarga	333.942.658,90



5110103	Tunjangan Jabatan	188.036.250,00
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	181.624.875,00
5110106	Tunjangan Beras	216.827.290,50
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.419.139,60
5110108	Pembulatan Gaji	51.974,68
5110121	Iuran BPJS Kesehatan	259.581.416,38
5110123	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.839.582,58
5110124	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	26.518.823,58
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.092.378.757,00
5110206	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.092.378.757,00
TOTAL ANGGARAN		8.556.727.693,67

Tabel 2.5
Rincian Alokasi Anggaran Belanja Langsung

KODE	URAIAN NAMA PROGRAM	ANGGARAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,804,268,197.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	620,211,651.00
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	605,601,200.00
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452,810,000.00
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	890,000,000.00
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	740,000,000.00
19	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	350,000,000.00
Jumlah		5,562,891,048.00

Tabel 2.6
Rincian Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan kuantabilitas Kinerja koperasi dan UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3,130,081,048.00
Meningkatnya Wirausaha Baru	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	350,000,000.00
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	1,630,000,000.00
Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	452,810,000.00
TOTAL		5,562,891,048.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2016- 2021, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2020.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran :

NO	SKALA CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	> 80 – 95 %	Berhasil
3	>50 - 80 %	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 50 %	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%.

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara , Nomor : Itda-700/268/LHE-SAKIP/VII/2020 tanggal 30 Juliu 2020 dimana hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaba KecilMenengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2019 memperoleh nilai sebesar 66,17 (enam puluh enam koma tujuh belas) atau dengan **predikat penilaian B ' (Baik)**. Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja sudah baik memiliki sistem yang dapat digunakan unhrk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan



pemerintah yaag berorientasi pada hasil di Organisasi Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

No.	Komponen Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP			Peningkatan / Penurunan Capaian (%)
		Bobot (%)	Nilai Tahun 2018	Nilai Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30	-	24,87	24,87
2	Pengukuran Kinerja	25	-	13,75	13,75
3	Pelaporan Kinerja	15	-	12,04	12,04
4	Evaluasi Internal	10	-	1,13	1,13
5	Pencapaian Kinerja	20	-	14,38	14,38
Nilai Hasil Evaluasi		100	-	66,17	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				B	

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2020 memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana Strategis 2016-2021, dan dapat disajikan kedalam table berikut ini :

Tabel 3.1

*Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	81,43	82,11	100
2.	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Presentase UMK Naik Kelas	%	3,24	3,24	100

Tabel 3.2

Realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Tahun Lalu 2017	Capaian Tahun Lalu 2018	Capaian Tahun Lalu 2019
1,	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi	81,43 %	82,11 %	77,13 %	81,30%	81,85 %



Aktif							
2.	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Presentase UMK Naik Kelas	3.24 %	3,24 %	2.89 %	2.84 %	2,97 %

Tabel 3.3

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra sd 2021	Capaian sd 2020 terhadap sd akhir Renstra 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	81,43 %	82,11 %	81,53%	82,11 %
2.	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Presentase UMK Naik Kelas	3.24 %	3,24 %	3.60 %	90 %

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisi Capaian kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan oleh Dnasi Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat penjelasan berikut ini :

Tabel 3.4

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas kelembagaan & usaha Koperasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Tahun Lalu 2017	Capaian Tahun Lalu 2018	Capaian Tahun Lalu 2019
Persentase Koperasi Aktif	81,43 %	82,11 %	77,13 %	81,30%	81,85 %

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan indikator **Persentase Koperasi Aktif** mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 82,11 % atau 100% melebihi dari target dengan predikat " Sangat Tinggi"



Adapun Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi tersebut dicapai melalui Program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp 1,196,230,917 dari anggaran sebesar Rp 1,630,000,000. atau 73,39% dari total anggaran. Realisasi kinerja sebesar 100 %, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Dan bila memperhatikan Tabel diatas, pada tahun 2020 capaian kinerja Persentase Koperasi Aktif yaitu 82,11 % dimana realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan 81,43 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase Koperasi Aktif adalah Sangat Tinggi , dan ini menunjukkan adanya peningkatan bila dilihat dari angka realisasi tahun lalu 81,85 %, dan cenderung menaik bila dibandingkan dengan angka pada tahun 2018 dengan angka 81,30 % dan seterusnya ditahun 2017 dengan angka 77,13%, dari capaian angka-angka tersebut dapat kita lihat penjelasan pada table berikut :

Tabel 3.5

Persentasi Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara



Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi** diukur dengan dua indicator yaitu Indikator Koperasi Aktif yang dibandingkan dengan Jumlah Koperasi seluruhnya. Dimana Koperasi Aktif pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan dengan angka 514 Koperasi Aktif jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2019 dengan angka 505 Koperasi Aktif, dan ditahun 2018 dengan angka 487 Koperasi Aktif maka Koperasi Aktif mengalami peningkatan, sedangkan Jumlah Koperasi seluruhnya mengalami trend peningkatan pula di tahun ini 2020 dimana jumlah



Koperasi sebanyak 626 jika dibandingkan dengan tahun lalu 2019 dengan angka 617 Koperasi, dan tahun 2018 dengan angka 599 Koperasi maka ada peningkatan Jumlah Koperasi, namun bila dibandingkan dengan tahun 2017 maka mengalami penurunan karena angka pada tahun 2017 ada sebanyak 656 Koperasi;

Tabel 3.6

Sebaran Koperasi Aktif Kabupaten Kutai Kartanegara :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	AKTIF	TDK AKTIF	BEKU	RAT
1	TABANG	24	23	1	-	5
2	KEMBANG JANGGUT	33	33	-	-	9
3	KENOHAN	15	14	1	-	3
4	MUARA WIS	5	4	1	-	2
5	KOTA BANGUN	22	21	1	-	3
6	MUARA KAMAN	48	44	4	-	9
7	MUARA MUNTAI	19	17	2	1	2
8	SEBULU	41	34	7	-	4
9	TENGGARONG	127	105	22	-	9
10	TENGGARONG SEBERANG	33	27	6	-	3
11	LOA KULU	45	40	5	-	8
12	LOA JANAN	35	26	9	-	2
13	SANGA SANGA	29	14	15	-	-
14	MUARA JAWA	29	24	5	-	5
15	SAMBOJA	47	36	11	-	3
16	ANGGANA	21	17	4	-	4
17	MUARA BADAK	33	25	8	-	4
18	MARANGKAYU	20	10	10	-	2
	JUMLAH	626	514	112	1	77

Faktor Pendorong :

Faktor pendorong atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Adanya Kegiatan pendampingan dan Memonitoring Rapat Anggota Tahunan Koperasi ketaatan Koperasi dalam melaksanakan kewajibannya salahsatunya Rapat Anggota Tahunan (RAT), Sebagaimana dengan Permenkop Nomor 25 tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi pada pasal 1 angka 3 bahwa **Koperasi Aktif** adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.





DOKUMENTASI RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN 2020

2. Adanya Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

3. Adanya kegiatan Fasilitasi Pembubaran Koperasi yang sudah beku atau tidak aktif atau Koperasi yang sudah tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya;



4. Melaksanakan Pelatihan bagi Pengurus/pengelola Koperasi yang bertujuan Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/Pengelola Koperasi dalam mengelola Koperasi sesuai dengan praktek Bisnis yang sehat, Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi agar dapat menjalankan usaha kopersi dengan baik;



Dokumentasi Kegiatan Pelatihan bagi Pengurus/pengelola Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

5. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Koperasi. Yang bertujuan meningkatkan pemahaman anggota koperasi mengetahui tentang koperasi, apa itu koperasi, bagaimana ikut dalam koperasi, hak dan kewajiban anggota dan hal-hal lain terkait koperasi;



Dokumentasi Sosialisasi Pemahaman Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

6. Memfasilitasi Pengembangan Koperasi melalui penguatan kelembagaan dalam usaha koperasi;



7. Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara ;



Dokumentasi Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

Faktor Penghambat :

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas secara masif, yang berujung pada penurunan gerak perekonomian, termasuk sektor koperasi, dan berdasarkan survey, laporan yang masuk pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai



Kartanegara sebagai besar dampaknya Penundaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi kewajiban koperasi, Penurunan Aktifitas Usaha Koperasi;

2. Persoalan internal Koperasi yaitu soal komitmen para anggota untuk saling memiliki koperasi, dimana dalam berkoperasi masih ada pemahaman para anggota sekadar memanfaatkan simpan-menyimpan, akan tetapi tak pernah meminjam untuk kegiatan usaha. Ini yang dinamakan tak punya rasa komitmen dalam berkoperasi, .

Tindak Lanjut / Solusi :

1. Memberikan petunjuk dan pendampingan dimasa Pandemi Covid-19 tentang Kewajiban Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dalam surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : P.516/DISKOPUKM/KPK.2/518/ tanggal 28 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2020;



FASILITASI RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) VIA VIRTUAL
TAHUN 2020



2. Untuk terus memberikan pemahaman kepada Koperasi bahwa persoalan komitmen berkoperasi menjadi pemikiran bersama karena sejatinya keberadaan koperasi bukan untuk kepentingan pengurus dan pengelola saja, tapi kebersamaan dan berorientasi pada kesejahteraan para anggota;



Tabel 3.7
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran 2 : Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Tahun Lalu 2017	Capaian Tahun Lalu 2018	Capaian Tahun Lalu 2019
Presentase Usaha Mikro Naik Kelas	3.28 %	3,23 %	2.89 %	2.84 %	2,97 %

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro dengan Indikator Presentase Usaha Mikro Naik Kelas mendapatkan angka capaian sebesar 3,23 dari target 3.28 % atau tingkat capaian sebesar 98,55 % 'Sangat Tinggi'.

Sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro tersebut dicapai melalui Program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
2. Dan satu Program yang mempengaruhi dan mendukung tingkat capaian Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp 311,564,750 dari anggaran sebesar Rp, 452,810,000 atau 68,81% dari total anggaran. Realisasi kinerja sebesar 99,69 %, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Dapat di jelaskan pula dari tabel diatas, pada tahun 2020 capaian kinerja UMKM Naik Kelas yaitu 3,28 % dimana realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan 3,23 % atau capaian 98 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase Usaha Mikro Naik Kelas adalah Tinggi , dan ini menunjukan adanya peningkatan bila dilihat dari angka realisasi tahun lalu 2,97 %, dan cendrung menaik pada tahun 2018 dengan angka 2,84 %, dan seterusnya ditahun 2017 dengan angka 2,89 %, dari capaian angka-angka tersebut dapat kita lihat penjelasan pada table berikut :

Tabel 3.8





TAHUN	UMK		WUB	NAIK KELAS	JUMLAH
	MIKRO	KECIL			
2015	37,806	825	0	0	38,631
2016	37,674	957	0	132	38,631
2017	37,680	1,125	174	168	38,805
2018	55,737	1,629	18561	504	57,366
2019	56,213	1,722	569	93	57,935
2020	56,343	1,882	290	160	58,225

Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran **Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro** diukur dengan dua indicator yaitu Indikator Usaha Mikro yang Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKMK seluruhnya. Dimana untuk Usaha Mikro Naik Kelas pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan dengan angka 160 UMK Naik Kelas jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2019 dengan angka 93 pelaku usaha maka ada peningkatan namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan jumlah 504 pelaku usaha, sedangkan Jumlah UMKM seluruhnya mengalami trend peningkatan tahun 2020 jumlah UMKM sebanyak 58.225 hal ini disebabkan adanya penambahan Wirausaha Baru dan jika dibandingkan degan tahun lalu 2019 dengan angka 57.935 UMKM, dan ditahun 2018 dengan angka 57.366 UMKM maka ada peningkatan Jumlah UMKM ;

Tabel 3.9
PERKEMBANGAN UMKM SESUAI KLASIFIKASI USAHA

NO	URAIAN	TAHUN						KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	JENIS USAHA							
	1 MIKRO							
	SALDO AWAL (BULAN JANUARI)		37.806	37.674	37.680	55.737	56,213	
	PERTUMBUHAN							
	A KULINER	2.010	-	51	23	299	88	2,471
	B FASION	1.021	-	10	-	43	16	1,090
	C PENDIDIKAN	5	-	0	-	2		7
	D OTOMOTIF	222	-	5	-	1	4	232
	E AGROBISNIS	4.329	-	16	18.512	6	15	22,878
	F TEKNOLOGI INTERNET	8	-	1	-	1	1	11
	G BIDANG LAIN	30.211	-	91	26	217	166	30,711
II	JUMLAH PERTUMBUHAN MIKRO	-	-	174	18.561	569	290	
	JUMLAH USAHA MIKRO (BULAN DESEMBER)	37.806	37.674	37.680	55.737	56.306	56,503	
			37.806 - 132	37674 + 174		56.213	56,343	(56.213 + 290 - 160 = 56.343)
				168				
	2 KECIL							
	SALDO AWAL (BULAN JANUARI)	825	825	957	1.125	1.629	1,722	
	PERTUMBUHAN							
	A KULINER	104	9	3	7	-	8	



	B FASION	52	3	3	1	-	5	
	C PENDIDIKAN	-	-	-	-	-		
	D OTOMOTIF	50	8	7	1	-	11	
	E AGROBISNIS	35	2	7	374	-	7	
	F TEKNOLOGI INTERNET	-	-	3	-	-		
	G BIDANG LAIN	584	110	145	121	93	129	
iii	JUMLAH PERTUMBUHAN KECIL	-	132	168	504	93		Naik
	JUMLAH USAHA KECIL (BULAN DESEMBER)	825	957	1.125	1.629	1.722	1,882	(56.343+1.882) = 58.225
	JUMLAH USAHA MIKRO KECIL (BULAN DESEMBER)	38.631	38.631	38.805	57.366	57,935	58,225	

Faktor Pendorong :

Faktor pendukung atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Kegiatan Pendampingan Penerbitan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) yang tujuannya adalah kepada setiap pelaku usaha perseorangan bisa mendapatkan legalitas usaha. Dengan memiliki IUMK berarti pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan, serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan. Dengan memiliki IUMK para pelaku usaha diharapkan dapat melakukan pengembangan usahanya sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi pelaku usaha yang naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah;



Dokumentasi Pendampingan Penerbitan IUMK di Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Adanya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMKM yang bertujuan untuk memberdayakan para Pelaku Usaha Mikro melalui kegiatan bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha seperti pelatihan atau sosialisai, yang di dukung pula oleh Instansi terkait dan lembaga lain sebagaimana table berikut :



Tabel 3.10

Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	KECAMATAN	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	JMLH PESERTA	PENYELENGGARA
1	TENGGARONG	1 Bimtek Kewirausahaan	24-25 Februari 2020	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab Kukar	30 Orang	Dinas perindagkopukm Prov.Kaltim Kerjasama Dgn Diskop UKM Kab Kukar
		2 Seminar OnLine "Gelas UMKM di tengah Pandemi Covid 19"	01 Juli 2020	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab Kukar	11 Orang	STIE Tenggerong dan Dinas Koperasi UKM Kab Kukar
		3 Bimtek Kewirausahaan bagi Kel Masyarakat Strategis	5-7 Agustus 2020	Hotel Grand Ely Singgasane	40 Orang	Dinas perindagkopukm Prov.Kaltim Kerjasama Dgn Diskop UKM Kab Kukar
		4 Digitalisasi UMK	11-14 Agustus 2020	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab Kukar	99 Orang	Bank Indonesia Perwakilan Prov. Kaltim Kerjasama dgn Diskop Ukm Kab. Kutai Kartanegara
		5 Digitalisasi UMK	8 September 2020	Pendopo Bupati Kutai Kartanegara	43 Orang	Bank Indonesia Perwakilan Prov. Kaltim Kerjasama dgn Diskop Ukm Kab. Kutai Kartanegara
		6 Bimtek Kewirausahaan bagi Kel Masyarakat Strategis	14-16 Desember 2020	SMKN 1 Tenggarong	40 Orang	Dinas perindagkopukm Prov.Kaltim Kerjasama Dgn Diskop UKM Kab Kukar
2	TENGGARONG SEBERANG	1 Pembentukan dan pelatihan Kelompok Usaha Produktif Desa Teluk dalam	28 Desember 2020	Ruang Pertemuan Kantor Desa Teluk dalam	20 Org	Kerjasama Desa Teluk dalam dengan Diskopukm Kab Kukar
3	SEBULU	1 Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin Usia Produktif	10 Februari 2020	Gedung PKK PKK Kec Sebulu	30 Org	Diskopukm Kab Kukar
4	SAMBOJA	1 Pendampingan Kel Masy Miskin Usia Produktif	12 - 13 Februari 2020	BPU Samboja	10 Orang	Diskopukm Kab Kukar
5	MUARA JAWA	1 Peran serta Lembaga kemasyarakatan untuk Mendorong UMK	10 Februari 2020	BPU Kelurahan Muara Jawa Ulu	51 Org	Kerjasama Kelurahan Muara Peisir dengan Diskopukm Kab Kukar
6	SANGA-SANGA	1 Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Anggota KUB di Kel Pendingin	26 Februari 2020	BPU Kelurahan pendingin	21 orang	Pemerintah kelurahan pendingin
7	ANGGANA	1 Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin Usia Produktif	24 oktober 2020	BPU Desa Handil Terusan	30 Orang	Diskopukm Kab Kukar
8	MARANG KAYU	1 Pengembangan kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro	2 Desember 2020	BPU Kec. Marang Kayu	30 Orang	Diskopukm Kab Kukar
9	MUARA WIS	1 Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin Usia Produktif	18 Maret 2020	Gedung PKK Kec. Muara Wis	30 Org	Diskopukm Kab Kukar
10	MUARA KAMAN	1 Pendampingan Kel Masy Miskin Usia Produktif	18- 19 Februari 2020	Desa Muara Kaman Ulu	13 Orang	Diskopukm Kab Kukar
Jumlah					498 Orang	



3. Adanya faktor pendukung yaitu melalui Kegiatan Pendataan UMK Tani dan Nelayan dan Kegiatan Pendataan WUB (Wira Usaha Baru) yang tujuan dalam pendataan ini adalah untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang berusaha pada sektor Tani dan Nelayan serta sektor usaha lainnya serta melihat perkembangan pelaku usaha mikro didalam usahanya;
4. Adanya factor pendukung yaitu kegiatan Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan yang bertujuan untuk mendapatkan data potensi UMKM yang riil di Desa dan Kelurahan pada 10 Kecamatan di Kukar yakni, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-sanga, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Kota Bangun;



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 3.11
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran : Meningkatnya Wirausaha Baru

INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Tahun Lalu 2017	Capaian Tahun Lalu 2018	Capaian Tahun Lalu 2019
Pertumbuhan Wirausaha Baru	UMKM	300 orang	290 orang	n/a	n/a	171 orang

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Wirausaha Baru dengan Indikator Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru mendapatkan angka capaian sebesar 290 dari target sebagaimana di Renstra 300 namun pada dokumen pelaksanaan kegiatan target 290 orang atau tingkat capaian sebesar 96,67 % 'Sangat Tinggi'.



Sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro tersebut dicapai melalui Program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp 195,486,400 dari anggaran sebesar Rp, 350,000,000 atau 55,85 % dari total anggaran. Realisasi kinerja sebesar 96,67 %, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

- 1) Adanya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi, keterampilan dan pengetahuan serta wawasan kepada para pelaku usaha pemula untuk menjadi pelaku usaha dalam memulai usahanya.



Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif

- 2) Adanya kegiatan Pendukung melalui Pendataan Wirausaha Baru

Faktor Penghambat :

- 1) Adanya Pandemi Covid 19 mengakibatkan banyaknya pembatasan terhadap aktifitas/kegiatan usaha para pelaku usaha didalam menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan penurunan pergerakan perekonomian. Dari beberapa pertemuan, menurut pelaku usaha dampak dari pandemi ini mengakibatkan produksi dan penjualan menurun sehingga menyulitkan para pelaku usaha mikro untuk menyelesaikan tanggungan atas pinjaman mereka ke lembaga keuangan atau lembaga non keuangan serta ada laporan dari pelaku usaha mikro yang pendapatan mereka menurun hingga ada yang tidak ada pendapatan sama sekali atau nol;
- 2) Persoalan kesulitan mendapatkan Akses Permodalan;
- 3) Tidak semua Pelaku Usaha menguasai IT atau penguasaan terhadap teknologi dan internet masih rendah.

Tindak Lanjut / Upaya-upaya dilakukan di Tengah Pandemi :

- 1) Melakukan Mengusulkan Data Pelaku Usaha Mikro, usulan data dari desa/kelurahan di 18 (delapan belas) kecamatan yang terdampak Covid-19 kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi melalui program bantuan langsung tunai Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia dan penyalurannya berakhir sampai tanggal 18 Februari 2021



Dokumentasi Kegiatan Pengumpulan
berkas Usulan Bantuan Presiden
Produktif Usaha Mikro (BPUM Kab.
Kutai Kartanegara)

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Jl. Pemuda No. 40-47 10.000 Tenggarong, Kalimantan Timur 75501 TENGAH MURUNG Website : http://pdkkk.kutai-kartanegara.go.id		Surat : stg@pdkkk.kutai-kartanegara.go.id
	Tenggarong, 17 September 2021		
Nomor : P. 1618 Tanggal : 17/09/2021 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Pengumuman Data Usaha RPKM S/L, 2020	Kepada : Kepala Via : Melalui Ekspresi dan TIKD Kepada : Rekanan		
	di : tanggal :		
Maksud dan tujuan Surat Menteri Kesehatan dan USM Republik Indonesia kepada Kepala Dinas yang menyebutkan Keputusan dari USM Provinsi Kalimantan Timur berkenaan dengan : Surat Menteri Kesehatan dan USM Provinsi Kalimantan Timur Nomor 107/MEN/USM/2021 Tanggal 4 Agustus 2020 dan Perihal : Pengumuman Pengeset Data Usaha RPKM Usaha Mikro, maka dengan ini diumumkan bahwa berikut ini dengan hal tersebut, yaitu berikut : 1. Surat Pengumuman dan Unduh Data Calon Penerima RPKM, 2. Data Usaha Rekanan RPKM Usaha Mikro (Berkas terlampir) Dengan diumumkan, agar perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih  DR. H. Y. A. B. BERNI Kepala Dinas Kecil (Stempel Dinas)			
Terlampir 1 Ekspresi 2R.....			

PROJECT CHARTER									
1. PROJECT INFORMATION		2. PROJECT DESCRIPTION							
3. PROJECT OBJECTIVES		4. PROJECT SCOPE							
5. PROJECT RATIONALE		6. PROJECT RISKS							
7. PROJECT BENEFITS		8. PROJECT IMPACT							
9. PROJECT STAKEHOLDERS		10. PROJECT APPROVAL							
11. PROJECT HISTORY		12. PROJECT STATUS							
13. PROJECT DOCUMENTS		14. PROJECT CONTACTS							
15. PROJECT CHANGE LOG		16. PROJECT CLOSURE							
17. PROJECT REVIEW		18. PROJECT ARCHIVE							
19. PROJECT REPORTING		20. PROJECT EVALUATION							
21. PROJECT FEEDBACK		22. PROJECT COMPLETION							
23. PROJECT POST-MORTEM		24. PROJECT ARCHIVING							
25. PROJECT REPORTING		26. PROJECT EVALUATION							
27. PROJECT FEEDBACK		28. PROJECT COMPLETION							
29. PROJECT POST-MORTEM		30. PROJECT ARCHIVING							
31. PROJECT REPORTING		32. PROJECT EVALUATION							
33. PROJECT FEEDBACK		34. PROJECT COMPLETION							
35. PROJECT POST-MORTEM		36. PROJECT ARCHIVING							
37. PROJECT REPORTING		38. PROJECT EVALUATION							
39. PROJECT FEEDBACK		40. PROJECT COMPLETION							
41. PROJECT POST-MORTEM		42. PROJECT ARCHIVING							
43. PROJECT REPORTING		44. PROJECT EVALUATION							
45. PROJECT FEEDBACK		46. PROJECT COMPLETION							
47. PROJECT POST-MORTEM		48. PROJECT ARCHIVING							
49. PROJECT REPORTING		50. PROJECT EVALUATION							
51. PROJECT FEEDBACK		52. PROJECT COMPLETION							
53. PROJECT POST-MORTEM		54. PROJECT ARCHIVING							
55. PROJECT REPORTING		56. PROJECT EVALUATION							
57. PROJECT FEEDBACK		58. PROJECT COMPLETION							
59. PROJECT POST-MORTEM		60. PROJECT ARCHIVING							
61. PROJECT REPORTING		62. PROJECT EVALUATION							
63. PROJECT FEEDBACK		64. PROJECT COMPLETION							
65. PROJECT POST-MORTEM		66. PROJECT ARCHIVING							
67. PROJECT REPORTING		68. PROJECT EVALUATION							
69. PROJECT FEEDBACK		70. PROJECT COMPLETION							
71. PROJECT POST-MORTEM		72. PROJECT ARCHIVING							
73. PROJECT REPORTING		74. PROJECT EVALUATION							
75. PROJECT FEEDBACK		76. PROJECT COMPLETION							
77. PROJECT POST-MORTEM		78. PROJECT ARCHIVING							
79. PROJECT REPORTING		80. PROJECT EVALUATION							
81. PROJECT FEEDBACK		82. PROJECT COMPLETION							
83. PROJECT POST-MORTEM		84. PROJECT ARCHIVING							
85. PROJECT REPORTING		86. PROJECT EVALUATION							
87. PROJECT FEEDBACK		88. PROJECT COMPLETION							
89. PROJECT POST-MORTEM		90. PROJECT ARCHIVING							
91. PROJECT REPORTING		92. PROJECT EVALUATION							
93. PROJECT FEEDBACK		94. PROJECT COMPLETION							
95. PROJECT POST-MORTEM		96. PROJECT ARCHIVING							
97. PROJECT REPORTING		98. PROJECT EVALUATION							
99. PROJECT FEEDBACK		100. PROJECT COMPLETION							
101. PROJECT POST-MORTEM		102. PROJECT ARCHIVING							
103. PROJECT REPORTING		104. PROJECT EVALUATION							
105. PROJECT FEEDBACK		106. PROJECT COMPLETION							
107. PROJECT POST-MORTEM		108. PROJECT ARCHIVING							
109. PROJECT REPORTING		110. PROJECT EVALUATION							
111. PROJECT FEEDBACK		112. PROJECT COMPLETION							
113. PROJECT POST-MORTEM		114. PROJECT ARCHIVING							
115. PROJECT REPORTING		116. PROJECT EVALUATION							
117. PROJECT FEEDBACK		118. PROJECT COMPLETION							
119. PROJECT POST-MORTEM		120. PROJECT ARCHIVING							
121. PROJECT REPORTING		122. PROJECT EVALUATION							
123. PROJECT FEEDBACK		124. PROJECT COMPLETION							
125. PROJECT POST-MORTEM		126. PROJECT ARCHIVING							
127. PROJECT REPORTING		128. PROJECT EVALUATION							
129. PROJECT FEEDBACK		130. PROJECT COMPLETION							
131. PROJECT POST-MORTEM		132. PROJECT ARCHIVING							
133. PROJECT REPORTING		134. PROJECT EVALUATION							
135. PROJECT FEEDBACK		136. PROJECT COMPLETION							
137. PROJECT POST-MORTEM		138. PROJECT ARCHIVING							
139. PROJECT REPORTING		140. PROJECT EVALUATION							
141. PROJECT FEEDBACK		142. PROJECT COMPLETION							
143. PROJECT POST-MORTEM		144. PROJECT ARCHIVING							
145. PROJECT REPORTING		146. PROJECT EVALUATION							
147. PROJECT FEEDBACK		148. PROJECT COMPLETION							
149. PROJECT POST-MORTEM		150. PROJECT ARCHIVING							
151. PROJECT REPORTING		152. PROJECT EVALUATION							
153. PROJECT FEEDBACK		154. PROJECT COMPLETION							
155. PROJECT POST-MORTEM		156. PROJECT ARCHIVING							
157. PROJECT REPORTING		158. PROJECT EVALUATION							
159. PROJECT FEEDBACK		160. PROJECT COMPLETION							
161. PROJECT POST-MORTEM		162. PROJECT ARCHIVING							
163. PROJECT REPORTING		164. PROJECT EVALUATION							
165. PROJECT FEEDBACK		166. PROJECT COMPLETION							
167. PROJECT POST-MORTEM		168. PROJECT ARCHIVING							
169. PROJECT REPORTING		170. PROJECT EVALUATION							
171. PROJECT FEEDBACK		172. PROJECT COMPLETION							
173. PROJECT POST-MORTEM		174. PROJECT ARCHIVING							
175. PROJECT REPORTING		176. PROJECT EVALUATION							
177. PROJECT FEEDBACK		178. PROJECT COMPLETION							
179. PROJECT POST-MORTEM		180. PROJECT ARCHIVING							
181. PROJECT REPORTING		182. PROJECT EVALUATION							
183. PROJECT FEEDBACK		184. PROJECT COMPLETION							
185. PROJECT POST-MORTEM		186. PROJECT ARCHIVING							
187. PROJECT REPORTING		188. PROJECT EVALUATION							
189. PROJECT FEEDBACK		190. PROJECT COMPLETION							
191. PROJECT POST-MORTEM		192. PROJECT ARCHIVING							
193. PROJECT REPORTING		194. PROJECT EVALUATION							
195. PROJECT FEEDBACK		196. PROJECT COMPLETION							
197. PROJECT POST-MORTEM		198. PROJECT ARCHIVING							
199. PROJECT REPORTING		200. PROJECT EVALUATION							
201. PROJECT FEEDBACK		202. PROJECT COMPLETION							
203. PROJECT POST-MORTEM		204. PROJECT ARCHIVING							
205. PROJECT REPORTING		206. PROJECT EVALUATION							
207. PROJECT FEEDBACK		208. PROJECT COMPLETION							
209. PROJECT POST-MORTEM		210. PROJECT ARCHIVING							
211. PROJECT REPORTING		212. PROJECT EVALUATION							
213. PROJECT FEEDBACK		214. PROJECT COMPLETION							
215. PROJECT POST-MORTEM		216. PROJECT ARCHIVING							
217. PROJECT REPORTING		218. PROJECT EVALUATION							
219. PROJECT FEEDBACK		220. PROJECT COMPLETION							
221. PROJECT POST-MORTEM		222. PROJECT ARCHIVING							
223. PROJECT REPORTING		224. PROJECT EVALUATION							
225. PROJECT FEEDBACK		226. PROJECT COMPLETION							
227. PROJECT POST-MORTEM		228. PROJECT ARCHIVING							
229. PROJECT REPORTING		230. PROJECT EVALUATION							
231. PROJECT FEEDBACK		232. PROJECT COMPLETION							
233. PROJECT POST-MORTEM		234. PROJECT ARCHIVING							
235. PROJECT REPORTING		236. PROJECT EVALUATION							
237. PROJECT FEEDBACK		238. PROJECT COMPLETION							
239. PROJECT POST-MORTEM		240. PROJECT ARCHIVING							
241. PROJECT REPORTING		242. PROJECT EVALUATION							
243. PROJECT FEEDBACK		244. PROJECT COMPLETION							
245. PROJECT POST-MORTEM		246. PROJECT ARCHIVING							
247. PROJECT REPORTING		248. PROJECT EVALUATION							
249. PROJECT FEEDBACK		250. PROJECT COMPLETION							
251. PROJECT POST-MORTEM		252. PROJECT ARCHIVING							
253. PROJECT REPORTING		254. PROJECT EVALUATION							
255. PROJECT FEEDBACK		256. PROJECT COMPLETION							
257. PROJECT POST-MORTEM		258. PROJECT ARCHIVING							
259. PROJECT REPORTING		260. PROJECT EVALUATION							
261. PROJECT FEEDBACK		262. PROJECT COMPLETION							
263. PROJECT POST-MORTEM		264. PROJECT ARCHIVING							
265. PROJECT REPORTING		266. PROJECT EVALUATION							
267. PROJECT FEEDBACK		268. PROJECT COMPLETION							
269. PROJECT POST-MORTEM		270. PROJECT ARCHIVING							
271. PROJECT REPORTING		272. PROJECT EVALUATION							
273. PROJECT FEEDBACK		274. PROJECT COMPLETION							
275. PROJECT POST-MORTEM		276. PROJECT ARCHIVING							
277. PROJECT REPORTING		278. PROJECT EVALUATION							
279. PROJECT FEEDBACK		280. PROJECT COMPLETION							
281. PROJECT POST-MORTEM		282. PROJECT ARCHIVING							
283. PROJECT REPORTING		284. PROJECT EVALUATION							
285. PROJECT FEEDBACK		286. PROJECT COMPLETION							
287. PROJECT POST-MORTEM		288. PROJECT ARCHIVING							
289. PROJECT REPORTING		290. PROJECT EVALUATION							
291. PROJECT FEEDBACK		292. PROJECT COMPLETION							
293. PROJECT POST-MORTEM		294. PROJECT ARCHIVING							
295. PROJECT REPORTING		296. PROJECT EVALUATION							
297. PROJECT FEEDBACK		298. PROJECT COMPLETION							
299. PROJECT POST-MORTEM		300. PROJECT ARCHIVING							
301. PROJECT REPORTING		302. PROJECT EVALUATION							
303. PROJECT FEEDBACK		304. PROJECT COMPLETION							
305. PROJECT POST-MORTEM		306. PROJECT ARCHIVING							
307. PROJECT REPORTING		308. PROJECT EVALUATION							
309. PROJECT FEEDBACK		310. PROJECT COMPLETION							
311. PROJECT POST-MORTEM		312. PROJECT ARCHIVING							
313. PROJECT REPORTING		314. PROJECT EVALUATION							
315. PROJECT FEEDBACK		316. PROJECT COMPLETION							
317. PROJECT POST-MORTEM		318. PROJECT ARCHIVING							
319. PROJECT REPORTING		320. PROJECT EVALUATION							
321. PROJECT FEEDBACK		322. PROJECT COMPLETION							
323. PROJECT POST-MORTEM		324. PROJECT ARCHIVING							
325. PROJECT REPORTING		326. PROJECT EVALUATION							
327. PROJECT FEEDBACK		328. PROJECT COMPLETION							
329. PROJECT POST-MORTEM		330. PROJECT ARCHIVING							
331. PROJECT REPORTING		332. PROJECT EVALUATION							
333. PROJECT FEEDBACK		334. PROJECT COMPLETION							
335. PROJECT POST-MORTEM		336. PROJECT ARCHIVING							
337. PROJECT REPORTING		338. PROJECT EVALUATION							
339. PROJECT FEEDBACK		340. PROJECT COMPLETION							
341. PROJECT POST-MORTEM		342. PROJECT ARCHIVING							
343. PROJECT REPORTING		344. PROJECT EVALUATION							
345. PROJECT FEEDBACK		346. PROJECT COMPLETION							
347. PROJECT POST-MORTEM		348. PROJECT ARCHIVING							
349. PROJECT REPORTING		350. PROJECT EVALUATION							
351. PROJECT FEEDBACK		352. PROJECT COMPLETION							
353. PROJECT POST-MORTEM		354. PROJECT ARCHIVING							
355. PROJECT REPORTING		356. PROJECT EVALUATION							
357. PROJECT FEEDBACK		358. PROJECT COMPLETION							
359. PROJECT POST-MORTEM		360. PROJECT ARCHIVING							
361. PROJECT REPORTING		362. PROJECT EVALUATION							
363. PROJECT FEEDBACK		364. PROJECT COMPLETION							
365. PROJECT POST-MORTEM		366. PROJECT ARCHIVING							
367. PROJECT REPORTING		368. PROJECT EVALUATION							
369. PROJECT FEEDBACK		370. PROJECT COMPLETION							
371. PROJECT POST-MORTEM		372. PROJECT ARCHIVING							
373. PROJECT REPORTING		374. PROJECT EVALUATION							
375. PROJECT FEEDBACK		376. PROJECT COMPLETION							
377. PROJECT POST-MORTEM		378. PROJECT ARCHIVING							
379. PROJECT REPORTING		380. PROJECT EVALUATION							
381. PROJECT FEEDBACK		382. PROJECT COMPLETION							
383. PROJECT POST-MORTEM		384. PROJECT ARCHIVING							
385. PROJECT REPORTING		386. PROJECT EVALUATION							
387. PROJECT FEEDBACK		388. PROJECT COMPLETION							
389. PROJECT POST-MORTEM		390. PROJECT ARCHIVING							
391. PROJECT REPORTING		392. PROJECT EVALUATION							
393. PROJECT FEEDBACK		394. PROJECT COMPLETION							
395. PROJECT POST-MORTEM		396. PROJECT ARCHIVING							
397. PROJECT REPORTING		398. PROJECT EVALUATION							
399. PROJECT FEEDBACK		400. PROJECT COMPLETION							
401. PROJECT POST-MORTEM		402. PROJECT ARCHIVING							
403. PROJECT REPORTING		404. PROJECT EVALUATION							
405. PROJECT FEEDBACK		406. PROJECT COMPLETION							
407. PROJECT POST-MORTEM		408. PROJECT ARCHIVING							
409. PROJECT REPORTING		410. PROJECT EVALUATION							
411. PROJECT FEEDBACK		412. PROJECT COMPLETION							
413. PROJECT POST-MORTEM		414. PROJECT ARCHIVING							
415. PROJECT REPORTING		416. PROJECT EVALUATION							
417. PROJECT FEEDBACK		418. PROJECT COMPLETION							
419. PROJECT POST-MORTEM		420. PROJECT ARCHIVING							
421. PROJECT REPORTING		422. PROJECT EVALUATION							
423. PROJECT FEEDBACK		424. PROJECT COMPLETION							
425. PROJECT POST-MORTEM		426. PROJECT ARCHIVING							
427. PROJECT REPORTING		428. PROJECT EVALUATION							
429. PROJECT FEEDBACK		430. PROJECT COMPLETION							
431. PROJECT POST-MORTEM		432. PROJECT ARCHIVING							
433. PROJECT REPORTING		434. PROJECT EVALUATION							
435. PROJECT FEEDBACK		436. PROJECT COMPLETION							
437. PROJECT POST-MORTEM		438. PROJECT ARCHIVING							
439. PROJECT REPORTING		440. PROJECT EVALUATION							
441. PROJECT FEEDBACK		442. PROJECT COMPLETION							
443. PROJECT POST-MORTEM		444. PROJECT ARCHIVING							
445. PROJECT REPORTING		446. PROJECT EVALUATION							
447. PROJECT FEEDBACK		448. PROJECT COMPLETION							
449. PROJECT POST-MORTEM		450. PROJECT ARCHIVING							
451. PROJECT REPORTING		452. PROJECT EVALUATION							
453. PROJECT FEEDBACK		454. PROJECT COMPLETION							
455. PROJECT POST-MORTEM		456. PROJECT ARCHIVING							
457. PROJECT REPORTING		458. PROJECT EVALUATION							
459. PROJECT FEEDBACK		460. PROJECT COMPLETION							
461. PROJECT POST-MORTEM		462. PROJECT ARCHIVING							
463. PROJECT REPORTING		464. PROJECT EVALUATION							
465. PROJECT FEEDBACK		466. PROJECT COMPLETION							
467. PROJECT POST-MORTEM		468. PROJECT ARCHIVING							
469. PROJECT REPORTING		470. PROJECT EVALUATION							
471. PROJECT FEEDBACK		472. PROJECT COMPLETION							
473. PROJECT POST-MORTEM		474. PROJECT ARCHIVING							
475. PROJECT REPORTING		476. PROJECT EVALUATION							
477. PROJECT FEEDBACK		478. PROJECT COMPLETION							
479. PROJECT POST-MORTEM		480. PROJECT ARCHIVING							
481. PROJECT REPORTING		482. PROJECT EVALUATION							
483. PROJECT FEEDBACK		484. PROJECT COMPLETION							
485. PROJECT POST-MORTEM		486. PROJECT ARCHIVING							
487. PROJECT REPORTING		488. PROJECT EVALUATION							
489. PROJECT FEEDBACK		490. PROJECT COMPLETION							
491. PROJECT POST-MORTEM		492. PROJECT ARCHIVING							
493. PROJECT REPORTING		494. PROJECT EVALUATION							
495. PROJECT FEEDBACK		496. PROJECT COMPLETION							
497. PROJECT POST-MORTEM		498. PROJECT ARCHIVING							
499. PROJECT REPORTING		500. PROJECT EVALUATION							
501. PROJECT FEEDBACK		502. PROJECT COMPLETION							
503. PROJECT POST-MORTEM		504. PROJECT ARCHIVING							
505. PROJECT REPORTING		506. PROJECT EVALUATION							
507. PROJECT FEEDBACK		508. PROJECT COMPLETION							
509. PROJECT POST-MORTEM		510. PROJECT ARCHIVING							
511. PROJECT REPORTING		512. PROJECT EVALUATION							
513. PROJECT FEEDBACK		514. PROJECT COMPLETION							
515. PROJECT POST-MORTEM		516. PROJECT ARCHIVING							
517. PROJECT REPORTING		518. PROJECT EVALUATION							
519. PROJECT FEEDBACK		520. PROJECT COMPLETION							
521. PROJECT POST-MORTEM		522. PROJECT ARCHIVING							
523. PROJECT REPORTING		524. PROJECT EVALUATION							
525. PROJECT FEEDBACK		526. PROJECT COMPLETION							
527. PROJECT POST-MORTEM		528. PROJECT ARCHIVING							
529. PROJECT REPORTING		530. PROJECT EVALUATION							
531. PROJECT FEEDBACK		532. PROJECT COMPLETION							
533. PROJECT POST-MORTEM		534. PROJECT ARCHIVING							
535. PROJECT REPORTING		536. PROJECT EVALUATION							
537. PROJECT FEEDBACK		538. PROJECT COMPLETION							
539. PROJECT POST-MORTEM		540. PROJECT ARCHIVING							
541. PROJECT REPORTING		542. PROJECT EVALUATION							
543. PROJECT FEEDBACK		544. PROJECT COMPLETION							
545. PROJECT POST-MORTEM		546. PROJECT ARCHIVING							
547. PROJECT REPORTING		548. PROJECT EVALUATION							
549. PROJECT FEEDBACK		550. PROJECT COMPLETION							
551. PROJECT POST-MORTEM		552. PROJECT ARCHIVING							
553. PROJECT REPORTING		554. PROJECT EVALUATION							
555. PROJECT FEEDBACK		556. PROJECT COMPLETION							
557. PROJECT POST-MORTEM		558. PROJECT ARCHIVING							
559. PROJECT REPORTING		560. PROJECT EVALUATION							
561. PROJECT FEEDBACK		562. PROJECT COMPLETION							
563. PROJECT POST-MORTEM		564. PROJECT ARCHIVING							
565. PROJECT REPORTING		566. PROJECT EVALUATION							
567. PROJECT FEEDBACK		568. PROJECT COMPLETION							
569. PROJECT POST-MORTEM		570. PROJECT ARCHIVING							
571. PROJECT REPORTING		572. PROJECT EVALUATION							
573. PROJECT FEEDBACK		574. PROJECT COMPLETION							
575. PROJECT POST-MORTEM		576. PROJECT ARCHIVING							
577. PROJECT REPORTING		578. PROJECT EVALUATION							
579. PROJECT FEEDBACK		580. PROJECT COMPLETION							
581. PROJECT POST-MORTEM		582. PROJECT ARCHIVING							
583. PROJECT REPORTING		584. PROJECT EVALUATION							
585. PROJECT FEEDBACK		586. PROJECT COMPLETION							
587. PROJECT POST-MORTEM		588. PROJECT ARCHIVING							
589. PROJECT REPORTING		590. PROJECT EVALUATION							
591. PROJECT FEEDBACK		592. PROJECT COMPLETION							
593. PROJECT POST-MORTEM		594. PROJECT ARCHIVING							
595. PROJECT REPORTING		596. PROJECT EVALUATION							
597. PROJECT FEEDBACK		598. PROJECT COMPLETION							
599. PROJECT POST-MORTEM		600. PROJECT ARCHIVING							
601. PROJECT REPORTING		602. PROJECT EVALUATION							
603. PROJECT FEEDBACK		604. PROJECT COMPLETION							
605. PROJECT POST-MORTEM		606. PROJECT ARCHIVING							
607. PROJECT REPORTING		608. PROJECT EVALUATION							
609. PROJECT FEEDBACK		610. PROJECT COMPLETION							
611. PROJECT POST-MORTEM		612. PROJECT ARCHIVING							
613. PROJECT REPORTING		614. PROJECT EVALUATION							
615. PROJECT FEEDBACK		616. PROJECT COMPLETION							
617. PROJECT POST-MORTEM		618. PROJECT ARCHIVING							
619. PROJECT REPORTING		620. PROJECT EVALUATION							
621. PROJECT FEEDBACK		622. PROJECT COMPLETION							
623. PROJECT POST-MORTEM		624. PROJECT ARCHIVING							
625. PROJECT REPORTING		626. PROJECT EVALUATION							
627. PROJECT FEEDBACK		628. PROJECT COMPLETION							
629. PROJECT POST-MORTEM		630. PROJECT ARCHIVING							
631. PROJECT REPORTING		632. PROJECT EVALUATION							
633. PROJECT FEEDBACK		634. PROJECT COMPLETION							
635. PROJECT POST-MORTEM		636. PROJECT ARCHIVING							
637. PROJECT REPORTING		638. PROJECT EVALUATION							
639. PROJECT FEEDBACK		640. PROJECT COMPLETION							
641. PROJECT POST-MORTEM		642. PROJECT ARCHIVING							
643. PROJECT REPORTING		644. PROJECT EVALUATION							
645. PROJECT FEEDBACK		646. PROJECT COMPLETION							
647. PROJECT POST-MORTEM		648. PROJECT ARCHIVING							
649. PROJECT REPORTING		650. PROJECT EVALUATION							
651. PROJECT FEEDBACK		652. PROJECT COMPLETION							
653. PROJECT POST-MORTEM		654. PROJECT ARCHIVING							
655. PROJECT REPORTING		656. PROJECT EVALUATION							
657. PROJECT FEEDBACK		658. PROJECT COMPLETION							
659. PROJECT POST-MORTEM		660. PROJECT ARCHIVING							
661. PROJECT REPORTING		662. PROJECT EVALUATION							
663. PROJECT FEEDBACK		664. PROJECT COMPLETION							
665. PROJECT POST-MORTEM		666. PROJECT ARCHIVING							
667. PROJECT REPORTING		668. PROJECT EVALUATION							
669. PROJECT FEEDBACK		670. PROJECT COMPLETION							
671. PROJECT POST-MORTEM		672. PROJECT ARCHIVING							
673. PROJECT REPORTING		674. PROJECT EVALUATION							
675. PROJECT FEEDBACK		676. PROJECT COMPLETION							
677. PROJECT POST-MORTEM		678. PROJECT ARCHIVING							
679. PROJECT REPORTING		680. PROJECT EVALUATION							
681. PROJECT FEEDBACK		682. PROJECT COMPLETION							
683. PROJECT POST-MORTEM		684. PROJECT ARCHIVING							
685. PROJECT REPORTING		686. PROJECT EVALUATION							
687. PROJECT FEEDBACK		688. PROJECT COMPLETION							
689. PROJECT POST-MORTEM		690. PROJECT ARCHIVING							
691. PROJECT REPORTING		692. PROJECT EVALUATION							
693. PROJECT FEEDBACK		694. PROJECT COMPLETION							
695. PROJECT POST-MORTEM		696. PROJECT ARCHIVING							
697. PROJECT REPORTING		698. PROJECT EVALUATION							
699. PROJECT FEEDBACK		700. PROJECT COMPLETION							

- 2) Bekerjasama bersama Disprindakop Propinsi Kaltim dalam Fasilitas Para Pelaku UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pembuatan Masker serta membantu membagikan Masker sebanyak 77.500 Masker ke Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berkerjasama dengan Disprindagkop Propinsi Kaltim;



Dokumentasi Pelaku UMKM Pembualan Masker di Kabupaten Kulai Kartanegara
berkerjasama dengan Disprindagkop Propinsi Kaltim



Dokumentasi Pembagian Masker ke Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara berkerjasama dengan Disprindagkop Propinsi Kaltim

3) Melakukan Pelatihan Digitalisasi UMKM menuju UMKM 4.0 berkerjasama dengan BI



Pelatihan Digitalisasi UMKM Menuju UMKM 4.0 Batch 2 bertempat di Pendopo Odah Etam pada tanggal 8 September 2020.

4) Melakukan seminar Geliat UMKM ditengah Pandemi Covid 19;



Seminar online Geliat UKM di tengah pandemi covid 19 Kerjasama dengan STIE Ketopong



Tabel 3.12
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran 3 : Meningkatnya Transparansi dan kuntabilitas Kinerja koperasi dan UKM

INDIKATOR KINERJA		Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Tahun Lalu 2017	Capaian Tahun Lalu 2018	Capaian Tahun Lalu 2019
Predikat	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	86 %	Belum diketahui	-	-	66,17 %

Memperhatikan Tabel diatas, pada tahun 2019, 66,17 % atau capaian dari target 77 % dan sedangkan pada tahun 2020 ini belum diketahui atau belum dilakukan Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten.

Adapun Sasaran Meningkatnya Transparansi dan kuntabilitas Kinerja koperasi dan UKM tersebut dicapai melalui Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp 2,580,635,727 dari anggaran sebesar Rp 3,130,081,048 atau 82,45% dari total anggaran. Realisasi kinerja sebesar 98.42 %, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

NO	PROGRAM	SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	97%	97%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	80%	84%	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	84%	84%	100%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset;	100%	100%	100%
		2. Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	80%	80%	100%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

- 1) Adanya pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD;
- 2) Adanya Komitmen yang baik dari seluruh ASN dilingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara;



B. Realisasi Anggaran

1. Analisa Kinerja Keuangan

Dalam rangka pencapaian target Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun Anggaran 2020 di alokasikan dana dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :

1. Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2020 sebesar **Rp. 8,556,727,693.67** dan direalisasikan sebesar **Rp. 7,696,900,079.00** atau **89.95 %** Dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

REK	URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
511	Belanja Pegawai	8.556.727.693,67	7.696.900.079,00	977.993.104,23	89,95
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.464.348.936,67	4.853.122.754,00	676.844.341,23	88,81
5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.237.506.925,45	3.795.891.099,00	235.996.617,69	89,58
5110102	Tunjangan Keluarga	333.942.658,90	301.630.834,00	-64.045.212,58	90,32
5110103	Tunjangan Jabatan	188.036.250,00	169.785.000,00	61.105.783,12	90,29
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	181.624.875,00	161.410.000,00	28.020.658,12	88,87
5110106	Tunjangan Beras	216.827.290,50	191.406.060,00	424.524.229,50	88,28
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.419.139,60	8.838.123,00	357.954,60	77,40
5110108	Pembulatan Gaji	51.974,68	46.608,00	25.515,32	89,67
5110121	Iuran BPJS Kesehatan	259.581.416,38	192.866.347,00	-36.424.422,88	74,30
5110123	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.839.582,58	7.812.155,00	6.821.146,42	88,38
5110124	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	26.518.823,58	23.436.528,00	20.462.071,92	88,38
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.092.378.757,00	2.843.777.325,00	301.148.763,00	91,96
5110206	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.092.378.757,00	2.843.777.325,00	301.148.763,00	91,96
TOTAL ANGGARAN		8.556.727.693,67	7.696.900.079,00	977.993.104,23	89,95

2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Sedangkan Anggaran Belanja Langsung (BL) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 5,562,891,048.00** dan direalisasikan sebesar **Rp 4,283,917,794.00** atau **77.01 %**, dapat di lihat pada table dibawah ini :



Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran 2020

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA	%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,884,288,187.00	1,537,813,884.00	266,454,303.00	85.23%
01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133,278,695.00	121,116,508.00	12,162,187.00	91%
01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13,650,000.00	6,363,430.00	7,286,570.00	47%
01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor	140,000,000.00	139,847,620.00	152,380.00	100%
01.006	Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000.00	69,712,500.00	287,500.00	100%
01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,000,000.00	45,713,000.00	4,287,000.00	91%
01.010	Penyediaan bahan logistik kantor	20,000,000.00	19,783,650.00	216,350.00	99%
01.011	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00	30,440,000.00	9,560,000.00	76%
01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	359,080,000.00	301,271,125.00	57,808,875.00	84%
01.015	Penyediaan jasa surat menyurat	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100%
01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250,000,000.00	233,796,490.00	16,204,510.00	94%
01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	727,059,502.00	568,570,571.00	158,488,931.00	78%
02	Program Peningkatan Barana dan Prasarana Aparatur	828,211,651.00	518,487,190.00	188,884,461.00	82.38%
02.001	Pengadaan peralatan gedung	120,263,800.00	108,417,000.00	11,846,800.00	90%
02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125,000,000.00	121,456,820.00	3,543,180.00	97%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118,800,000.00	81,545,000.00	37,255,000.00	69%
02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70,000,000.00	26,932,500.00	43,067,500.00	38%
02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	186,147,851.00	172,055,870.00	14,091,981.00	92%
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,111,000,000.00	62,987,080.00	37,812,920.00	82.99%
05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	50,000,000.00	22,764,080.00	27,235,920.00	46%
05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	50,000,000.00	40,223,000.00	9,777,000.00	80%
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	605,601,200.00	469,427,563.00	136,173,637.00	77.51%
06.009	Publikasi Perencanaan Pembangunan	78,518,200.00	78,518,200.00	-	100%
06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website	30,000,000.00	10,304,700.00	19,695,300.00	34%
06.020	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	21,783,000.00	10,182,000.00	11,601,000.00	47%
06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	190,000,000.00	121,365,263.00	68,634,737.00	64%
06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	191,373,800.00	169,493,200.00	21,880,600.00	89%



06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	93,926,200.00	79,564,200.00	14,362,000.00	85%
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452,810,000.00	311,884,750.00	141,245,250.00	68.81%
16.001	Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	85,000,000.00	30,802,700.00	54,197,300.00	36%
16.004	Pendataan UMK Tani dan Nelayan	67,810,000.00	66,640,000.00	1,170,000.00	98%
16.006	Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan	150,000,000.00	145,608,800.00	4,391,200.00	97%
16.011	Pendampingan Penerbitan IUMK	150,000,000.00	68,513,250.00	81,486,750.00	46%
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	886,888,888.00	484,828,888.00	395,180,000.00	55.80%
17.001	Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	115,000,000.00	88,961,000.00	26,039,000.00	77%
17.003	Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	115,000,000.00	67,701,000.00	47,299,000.00	59%
17.006	Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi	485,000,000.00	183,243,000.00	301,757,000.00	38%
17.007	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	75,000,000.00	55,531,000.00	19,469,000.00	74%
17.009	Pengembangan Usaha Koperasi	100,000,000.00	99,384,000.00	616,000.00	99%
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	748,888,888.00	701,410,917.00	38,589,883.00	94.78%
18.001	Pendampingan dan money RAT Koperasi	225,000,000.00	224,450,500.00	549,500.00	100%
18.002	Fasilitasi Pembubaran Koperasi	90,000,000.00	82,874,800.00	7,125,200.00	92%
18.006	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	150,000,000.00	147,052,767.00	2,947,233.00	98%
18.009	Pelatihan Pengurus Koperasi	50,000,000.00	42,101,000.00	7,899,000.00	84%
18.015	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung	75,000,000.00	74,549,850.00	450,150.00	99%
18.019	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	150,000,000.00	130,382,000.00	19,618,000.00	87%
19	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	358,888,888.00	195,486,400.00	163,402,488.00	55.85%
19.002	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	150,000,000.00	109,870,400.00	40,129,600.00	73%
19.005	Pendataan Wirausaha Baru	200,000,000.00	85,616,000.00	114,384,000.00	43%
Jumlah		5,562,891,048.00	4,283,917,794.00	1,278,973,254.00	77.01%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun Anggaran 2020 berupa capaian keuangan sebesar 77,01 %. Berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat dinilai dengan penilaian sebagai berikut :

1. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 76% - 100% dan dikategorikan berhasil/tercapai namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan.



Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan baik.

2. Terdapat Kegiatan yang dilakukan Refocusing / Tidak dapat dilaksanakan diantaranya:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan.
 - b. Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan (tidak dilaksanakan Belum Prioritas untuk dilaksanakan);
 - c. Pengembangan Usaha Komoditi Jagung bagi Koperasi (tidak dilaksanakan Terkendala situasi Pandemi);
 - d. Penataan dan Pembinaan UMKM pada destinasi pariwisata (tidak dilaksanakan Terkendala situasi Pandemi Covid)
 - e. Pengusulan Koperasi Berprestasi/ Penghargaan Tanda Jasa Koperasi & Tokoh Penggerak Koperasi (belum prioritas, dan tidak dilaksanakan, situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan pada kondisi Pandemi Covid)
 - f. Fasilitasi Kegiatan Dekopinda (tidak dilaksanakan, Jadwal Event sudah lewat pada Situasi keadaan Pandemi);
 - g. Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Kampung KB (tidak dilaksanakan, Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan pada keadaan Pandemi Covid)
 - h. Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha (tidak dilaksanakan Proposal tidak ada, Belum memungkinkan untuk dilaksanakan dan belum sesuai mekanisme Perbup 65 Tahun 2019 tentang Hibah dan Bansos)
 - i. Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif ((tidak dilaksanakan Proposal tidak ada, Belum memungkinkan untuk dilaksanakan dan belum sesuai mekanisme Perbup 65 Tahun 2019 tentang Hibah dan Bansos)

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum tercapai realisasi anggaran, antara lain :

1. Kedepan untuk Belanja Barang yang diserahkan masyarakat maka diawal-awal agar dilakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap Belanja yang akan diserahkan masyarakat sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mendorong untuk dilakukan Perubahan Peraturan Bupati terkait dengan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berkaitan langsung dengan Individu / masyarakat miskin;
3. Mengatur dan menyusun skala Prioritas atas kegiatan terhadap penggunaan rekening-rekening belanja dan penetapan lokasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun;



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2020 memuat dokumentasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada dan tetap mengacu pada kondisi aktual, maka tergambar capaian kinerja organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama tahun 2020.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2020 ini disajikan dalam urutan sistematika yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait.

Tentunya LKjIP ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja tahun lalu kami lampirkan, maupun dokumen akuntabilitas organisasi lainnya.

Demikian LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2020 ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan;

Tenggarong, Februari 2021
Kepala Dinas

Drs. H. TAJUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19640405 198603 1 036



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Tajuddin**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum**

Jabatan : Plt. Bupati Kutai Kartanegara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Plt. Bupati Kutai Kartanegara



H. CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum

Pihak Pertama, ' ,

Kepala Dinas

DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640405 198603 1 036

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	81.42
2	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	3.28

PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.804.268.197,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	620.211.651,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	605.601.200,00
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452.810.000,00
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	890.000.000,00
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	740.000.000,00
8	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	350.000.000,00
JUMLAH		5.562.891.048,00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Plt. Bupati Kutai Kartanegara



H. CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum

Pihak Pertama,

Kepala Dinas,

**DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640405 198603 1 036**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismi Nurul Huda, SP., MM**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Tajuddin**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kepala Dinas,

DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640405 198603 1 036

Pihak Pertama,

Sekretaris,

ISMI NURUL HUDA, SP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700924 199503 2 003

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian pemerintahan	%	100
		Rata-Rata Nilai SKP	%	84
		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	%	80
		% Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	%	2
		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100

PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.804.268.197,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	620.211.651,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	605.601.200,00
JUMLAH		3.130.081.048,00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kepala Dinas,

DRS. TAJUDDIN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640405 198603 1 036

Pihak Pertama,

Sekretaris,

ISMI NURUL HUDA, SP., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700924 199503 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Endri Rosandi, S.Sos**

Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ismi Nurul Huda, SP., MM**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Sekretaris,

ISMI NURUL HUDA, SP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700924 199503 2 003

Pihak Pertama,

Kasubbag Penyusunan Program dan
Keuangan,

ROSANDI, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19741102 2003 12 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akmad Jaini, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ismi Nurul Huda, SP., MM**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Sekretaris,

ISMI NURUL HUDA, SP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700924 199503 2 003

Pihak Pertama,

Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian,

AKMAD JAINI, S.SOS., M.SI
PENATA TK I
NIP. 19660703 198703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening	Rekening/ Bulan	12
		Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan	12 (23 Unit)
		Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Paket/Tahun	1
		Jumlah ATK/Paket	Paket	1
		Jumlah cetak dan penggandaan	Paket	1
		Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor	Paket	2
		Jumlah Kotak Makanan dan Minuman	Paket	3
		Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Paket	1
		Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	Bulan	12
		Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	lembar	186
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan	Paket	4
		Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Paket	1
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	2
		Jumlah Pemeliharaan Rutin	Paket	1
		Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan	bulan	12 (23 Unit)
		Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	Paket	5
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	3
3	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	Inovasi	1
4	Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Update Data Asset	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen	Dokumen	1

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.804.268.197,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	133.278.695,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penzinan Kendaraan Dinas / Operasional	13,650,000.00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	140,000,000.00
	Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,000,000.00
	Penyediaan bahan logistik kantor	20,000,000.00
	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	359,080,000.00
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	1,200,000.00
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250,000,000.00
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	727.059.502,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	620.211.651,00
	Pengadaan peralatan gedung	120.263.800,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125,000,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118,800,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70.000.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	186.147.851,00
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	100,000,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	50,000,000.00
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	50,000,000.00
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	115.709.200,00
	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	21,783,000.00
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	93.926.200,00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Sekretaris,

Pihak Pertama,

Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian,

ISMI NURUL HUDA, SP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700924 199503 2 003

AKMAD JAINI, S.SOS., M.SI
PENATA TK I
NIP. 19660703 198703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	1
		Jumlah event dan publikasi yang diikuti	Event	1
		Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	Web	1

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Rp 190.000.000
	- Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 191.373.800
	- Publikasi Perencanaan Pembangunan	Rp 78.518.200
	- Pengembangan dan Pengelolaan Website	Rp 30.000.000
JUMLAH		Rp 489.892.000

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Sekretaris,

ISMI NURUL HUDA, SP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700924 199503 2 003

Pihak Pertama,

Kasubbag Penyusunan Program
dan Keuangan,

ENDRI ROSANDI, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19741102 2003 12 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.SAMIJAN,S.E**

Jabatan : Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Tajuddin**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640405 198603 1 036

Pihak Pertama,
Kabid Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi,

H.SAMIJAN,S.E
PEMBINA TK.I
NIP. 19650611 198603 1 021

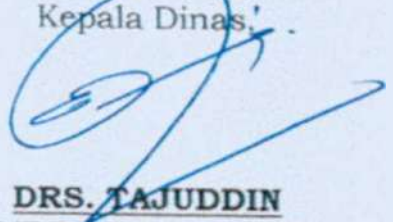
**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Koperasi Melakukan RAT	%	31
		Jumlah Pendampingan dan evaluasi	unit	140
		Jumlah Fasilitas Pembubaran Koperasi	unit	90
		Jumlah Koperasi yang Diawasi dan Dinilai	unit	36
		Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	orang	30
		Jumlah fasilitas koperasi petani jagung	unit	6
		Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	90

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	740.000.000,00
	Pendampingan dan money RAT Koperasi	225,000,000.00
	Fasilitas Pembubaran Koperasi	90,000,000.00
	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	150,000,000.00
	Pelatihan Pengurus Koperasi	50,000,000.00
	Fasilitas Pengembangan Koperasi Petani Jagung	75,000,000.00
	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	150,000,000.00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,


DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640405 198603 1 036

Pihak Pertama,
Kabid Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi,


H.SAMUJAN,S.E
PEMBINA
NIP. 19650611 198603 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUTRIKAH, S.E., M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Organisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.SAMIJAN, S.E**

Jabatan : Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi,

H.SAMIJAN, S.E
PEMBINA

NIP. 19650611 198603 1 021

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Organisasi,

MUTRIKAH, S.E., M.Si
PEMBINA

NIP. 19660227 200003 2 005

PERJANJIAN KINERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

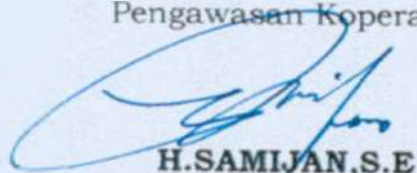
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah Fasilitas Pembubaran Koperasi	unit	90
		Jumlah Pengurus Koperasi yang lebih	Orang	30
		Jumlah fasilitas koperasi petani jagung	Unit	6
		Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	90

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	365.000.000,00
	Fasilitas Pembubaran Koperasi	90.000.000.00
	Pelatihan Pengurus Koperasi	50.000.000.00
	Fasilitas Pengembangan Koperasi Petani Jagung	75.000.000.00
	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	150.000.000.00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi,


H.SAMIJAN, S.E
PEMBINA

NIP. 19650611 198603 1 021

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Organisasi,


MUTRIKAH, S.E., M.Si
PEMBINA

NIP. 19660227 200003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. M. PADHI, S.E**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.SAMIJAN,S.E**

Jabatan : Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi,

H.SAMIJAN,S.E

PEMBINA

NIP. 19650611 198603 1 021

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengawasan dan
Pemeriksaan,

H. M. PADHI, S.E

PENATA

NIP. 19720416 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diawasi dan Dinilai	unit	36
		Jumlah Dokumen usulan	Dokumen	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	150.000.000,00
	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	150.000.000,00
	Pengusulan Koperasi Berprestasi/ Penghargaan Tanda Jasa Koperasi & Tokoh Penggerak Koperasi	0

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi,

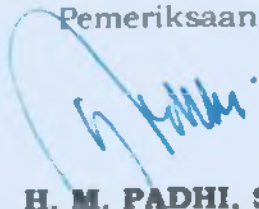
H. SAMIJAN, S.E

PEMBINA

NIP. 19650611 198603 1 021

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengawasan dan
Pemeriksaan,


H. M. PADHI, S.E

PENATA

NIP. 19720416 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISKA MMI,S.E**

Jabatan : Kepala Seksi Tatalaksana dan Keanggotaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.SAMIJAN,S.E**

Jabatan : Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi,

H.SAMIJAN,S.E

PEMBINA

NIP. 19650611 198603 1 021

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tatalaksana dan
Keanggotaan,

ISKA MMI,S.E I

PENATA TK. I

NIP. 19740810 200604 1 015

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

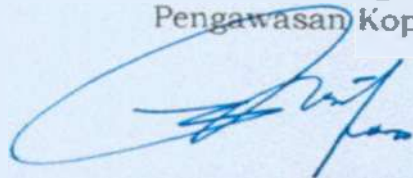
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah Pendampingan dan evaluasi	unit	140
		Cakupan Fasilitas kegiatan	Event	0
		Jumlah penataan koperasi dan UKM di kampung KB	Unit	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	225,000,000.00
	Pendampingan dan money RAT Koperasi	225,000,000.00
	Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Kampung KB	0
	Fasilitas Pengembangan Koperasi Petani Jagung	0

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi,



H.SAMIJAN, S.E
PEMBINA

NIP. 19650611 198603 1 021

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tatalaksana dan
Keanggotaan,



ISKA MMI, S.E I
PENATA TK. I

NIP. 19740810 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ASDIAN, S.E**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Tajuddin**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640405 198603 1 036

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi,

H. ASDIAN, S.E
PEMBINA
NIP. 19630919 198603 1 025

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah fasilitasi kerjasama Koperasi	Unit	7
		Jumlah fasilitasi kerjasama permodalan koperasi	Unit	7
		Jumlah Koperasi yang dikembangkan untuk usaha jagung	-	-
		Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	Unit	50
		Jumlah Koperasi yang di monev	Unit	15
		Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih	Orang	36
		Jumlah Usaha Mikro yang ditata di Destinasi Pariwisata	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	890.000.000,00
	Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	115.000.000,00
	Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	115.000.000,00
	Pengembangan Usaha Komoditi Jagung bagi Koperasi	-
	Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi	485.000.000,00
	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	75.000.000,00
	Pengembangan Usaha Koperasi	100.000.000,00
	Penataan dan Pembinaan UMKM pada destinasi pariwisata	-

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640405 198603 1 036

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi,

H. ASDIAN, S.E
PEMBINA
NIP. 19630919 198603 1 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. YUSIANA, SE., MM**

Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ASDIAN, S.E**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi,

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi,

H. ASDIAN, S.E

PEMBINA

NIP. 19630919 198603 1 025

Hj. YUSIANA, SE., MM

PEMBINA

NIP. 19650526 199203 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah fasilitasi kerjasama Koperasi	Unit	7
		Jumlah Usaha Mikro yang ditata di Destinasi Pariwisata	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	115,000,000.00
	Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	115.000.000,00
	Penataan dan Pembinaan UMKM pada destinasi pariwisata	-

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi,



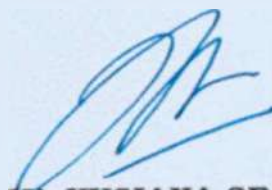
H. ASDIAN, S.E

PEMBINA

NIP. 19630919 198603 1 025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi,



Hj. YUSIANA, SE., MM

PEMBINA

NIP. 19650526 199203 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PRAYETNO, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ASDIAN, S.E**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi,

Kepala Seksi Permodalan dan Simpan
Pinjam,

H. ASDIAN, S.E

PRAYETNO, S.Sos

PEMBINA

Penata Tk.I / III/d

NIP. 19630919 198603 1 025

NIP. 19671023 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah fasilitasi kerjasama permodalan koperasi	Unit	7
		Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	Unit	50
		Jumlah Koperasi yang di moneyv	Unit	15

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	675.000.000,00
	Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	115.000.000,00
	Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi	485.000.000,00
	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	75.000.000,00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi,



H. ASDIAN, S.E
Pembina / IV/a
NIP. 19630919 198603 1 025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi,



PRAYETNO, S.Sos
Penata Tk.I / III/d
NIP. 19671023 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RATNI ASNI, S.E**

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ASDIAN, S.E**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi,

H. ASDIAN, S.E

PEMBINA

NIP. 19630919 198603 1 025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengembangan dan
Perlindungan Koperasi,

RATNI ASNI, S.E

PENATA TK. I

NIP. 19661025 198703 2 010

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

O	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan untuk usaha jagung	-	-
		Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih	Orang	36

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100,000,000.00
	Pengembangan Usaha Komoditi Jagung bagi Koperasi	-
	Pengembangan Usaha Koperasi	100.000.000,00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi,

Kepala Seksi Pengembangan dan
Perlindungan Koperasi,




H. ASDIAN, S.E

RATNI ASNI, S.E

PEMBINA

PENATA TK. I

NIP. 19630919 198603 1 025

NIP. 19661025 198703 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.Dianto Raharjo, S.P.,M.P**

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Tajuddin**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kepala Dinas,

DRS. TAJUDDIN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640405 198603 1 036

Pihak Pertama,

Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro,

H.DIANTO RAHARJO, S.P.,M.P

PEMBINA TK.I

NIP. 19671213 199603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	3,28
		Jumlah Sentra UMK yang difasilitasi	Unit	3
		Jumlah wirausaha yang dilatih	-	-
		Jumlah Laporan/Dok UMK Tani dan Nelayan	dokumen	1
		Jumlah Dokumen	dokumen	1
		Jumlah Event	-	-
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan/ Pertemuan	Orang	180
		Jumlah Dokumen	-	-
2	Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	Orang	300
		Jumlah sarana dan prasarana usaha	-	-
		Jumlah yang dilatih	Orang	90
		Jumlah bantuan peralatan usaha untuk Kelompok masyarakat	-	-
		Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdata	Orang	200

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452.810.000,00
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	85.000.000,00
	Pelatihan wirausaha baru	-
	Pendataan IUMK Tani dan Nelayan	67.810.000,00
	Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan	150.000.000,00
	Fasilitasi dan Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro	-
	Pendampingan Penerbitan IUMK	150.000.000,00
	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan	-
2	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	350.000.000,00
	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha	-
	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	150.000.000,00
	Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif	-
	Pendataan Wirausaha Baru	200.000.000,00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

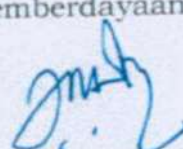
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Dinas,

Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro,


DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640405 198603 1 036


H. DIANTO RAHARJO, S.P., M.P
PEMBINA TK.I
NIP. 19671213 199603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. MASLIAH .M, SH.,M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Kewirausahaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.DIANTO RAHARJO, S.P.,M.P**

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Pemberdayaan Usaha
Mikro,

H.DIANTO RAHARJO, S.P.,M.P

PEMBINA TK.I

NIP. 19671213 199603 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Kewirausahaan,

HJ. MASLIAH .M, SH.,M.SI

PEMBINA

NIP. 19641211 199203 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

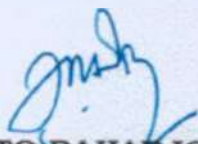
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Jumlah Sentra UMK yang difasilitasi	Unit	3
		Jumlah wirausaha yang dilatih	-	-
2	Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru	Jumlah yang dilatih	Orang	90

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	85.000.000.00
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	85.000.000.00
	Pelatihan wirausaha baru	-
2	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	150.000.000.00
	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	150.000.000.00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

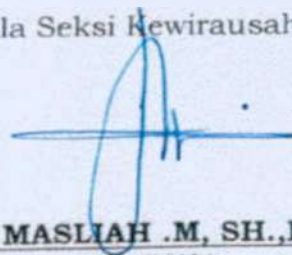
Kabid Pemberdayaan Usaha
Mikro,



H. DIANTO RAHARJO, S.P., M.P
PEMBINA TK.I
NIP. 19671213 199603 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Kewirausahaan,



H.J. MASLIAH .M, SH., M.SI
PEMBINA
NIP. 19641211 199203 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EVA YUSTIKA RINI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.DIANTO RAHARJO, S.P., M.P**

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Pemberdayaan Usaha
Mikro,

H.DIANTO RAHARJO, S.P., M.P
PEMBINA TK.I
NIP. 19671213 199603 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengembangan dan
Perlindungan Usaha Mikro,

EVA YUSTIKA RINI, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19770212 200604 2 017

PERJANJIAN KINERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Jumlah Dokumen	dokumen	1
		Jumlah Event	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	150,000,000.00
	1. Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan	150,000,000.00
	2. Fasilitasi dan Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro	-

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Pemberdayaan Usaha
Mikro,



H. DIANTO RAHARJO, S.P., M.P
PEMBINA TK.I
NIP. 19671213 199603 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengembangan dan
Perlindungan Usaha Mikro,



EVA YUSTIKA RINI, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19770212 200604 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDAH SEPTIANA NUGRAHAINI, SE**

Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.DIANTO RAHARJO, S.P.,M.P**

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Kabid Pemberdayaan Usaha
Mikro,

H.DIANTO RAHARJO, S.P.,M.P

PEMBINA TK.I

NIP. 19671213 199603 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro,

INDAH SEPTIANA NUGRAHAINI, SE

PENATA TK I

NIP. 19820911 200112 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

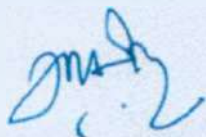
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Jumlah Laporan/Dok UMK Tani dan Nelayan	dokumen	1
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan/ Pertemuan	Orang	180
		Jumlah Dokumen	-	-
2	Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru	Jumlah sarana dan prasarana usaha	-	-
		Jumlah bantuan peralatan usaha untuk Kelompok masyarakat	-	-
		Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdata	Orang	200

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	217.810.000,00
	Pendataan UMK Tani dan Nelayan	67.810.000,00
	Pendampingan Penerbitan IUMK	150.000.000,00
	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan	-
2	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	200.000.000,00
	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha	-
	Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif	-
	Pendataan Wirausaha Baru	200.000.000,00

Tenggarong, 27 Oktober 2020

Pihak Kedua,

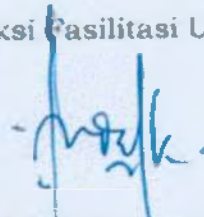
Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro,



H. DIANTO RAHARJO, S.P..M.P
PEMBINA TK I
NIP. 19671213 199603 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro,



INDAH SEPTIANA NUGRAHAINI, SE
PENATA TK I
NIP. 19820911 200112 2 002

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Nama Unit Organisasi : **DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
- 2 Tugas : Mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Koperasidan Usaha Kecil Menengah
- 3 Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. Pelaksanaan adminsitrasi Dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

4 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan Indikator				Unit Penanggung Jawab
			SATUAN	Alasan Pemilihan	Cara Perhitungan	Sumber Data	
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	<i>Persentase Koperasi Aktif</i>	%	Untuk mengetahui berapa Jumlah Koperasi yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100\%$	DKUKM	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Koperasi
2	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	<i>Persentase Usaha Mikro yang naik kelas</i>	%	Mengetahui jumlah Usaha Mikro yang meningkat / naik kelas	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas}}{\text{Jumlah usaha mikro Aktif}} \times 100\%$	DKUKM	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro



 Kepala Dinas
 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Drs. H. TAJUDDIN
 NIP. 196404051986031036



Lampiran

**REALISASI ANGGARAN
DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020**

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA	%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,884,282,187.00	1,537,813,894.00	266,454,303.00	85.23%
01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133,278,695.00	121,116,508.00	12,162,187.00	91%
01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13,650,000.00	6,363,430.00	7,286,570.00	47%
01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor	140,000,000.00	139,847,620.00	152,380.00	100%
01.006	Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000.00	69,712,500.00	287,500.00	100%
01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,000,000.00	45,713,000.00	4,287,000.00	91%
01.010	Penyediaan bahan logistik kantor	20,000,000.00	19,783,650.00	216,350.00	99%
01.011	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00	30,440,000.00	9,560,000.00	76%
01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	359,080,000.00	301,271,125.00	57,808,875.00	84%
01.015	Penyediaan jasa surat menyurat	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100%
01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250,000,000.00	233,795,490.00	16,204,510.00	94%
01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	727,059,502.00	568,570,571.00	158,488,931.00	78%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	620,211,851.00	510,407,180.00	109,804,671.00	82.30%
02.001	Pengadaan peralatan gedung	120,263,800.00	108,417,000.00	11,846,800.00	90%
02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125,000,000.00	121,456,820.00	3,543,180.00	97%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118,800,000.00	81,545,000.00	37,255,000.00	69%
02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70,000,000.00	26,932,500.00	43,067,500.00	38%
02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	186,147,851.00	172,055,870.00	14,091,981.00	92%
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	188,000,000.00	62,987,080.00	37,012,920.00	62.99%
05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	50,000,000.00	22,764,080.00	27,235,920.00	46%
05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	50,000,000.00	40,223,000.00	9,777,000.00	80%
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	885,881,200.00	488,427,583.00	136,173,637.00	77.51%
06.009	Publikasi Perencanaan Pembangunan	78,518,200.00	78,518,200.00	-	100%
06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website	30,000,000.00	10,304,700.00	19,695,300.00	34%
06.020	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	21,783,000.00	10,182,000.00	11,601,000.00	47%
06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Money	190,000,000.00	121,365,263.00	68,634,737.00	64%
06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	191,373,800.00	169,493,200.00	21,880,600.00	89%



06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	93,926,200.00	79,564,200.00	14,362,000.00	85%
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452,810,000.00	311,584,250.00	141,245,250.00	68.81%
16.001	Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	85,000,000.00	30,802,700.00	54,197,300.00	36%
16.004	Pendataan UMK Tani dan Nelayan	67,810,000.00	66,640,000.00	1,170,000.00	98%
16.005	Penyusunan Komoditi UMK Unggulan	150,000,000.00	145,608,800.00	4,391,200.00	97%
16.011	Pendampingan Penerbitan IUMK	150,000,000.00	68,513,250.00	81,486,750.00	46%
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	890,000,000.00	494,820,000.00	395,180,000.00	55.63%
17.001	Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	115,000,000.00	88,961,000.00	26,039,000.00	77%
17.003	Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	115,000,000.00	67,701,000.00	47,299,000.00	59%
17.006	Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi	485,000,000.00	183,243,000.00	301,757,000.00	38%
17.007	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	75,000,000.00	55,531,000.00	19,469,000.00	74%
17.009	Pengembangan Usaha Koperasi	100,000,000.00	99,384,000.00	616,000.00	99%
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	748,880,000.00	701,418,917.00	38,589,083.00	94.79%
18.001	Pendampingan dan money RAT Koperasi	225,000,000.00	224,450,500.00	549,500.00	100%
18.002	Fasilitasi Pembubaran Koperasi	90,000,000.00	82,874,800.00	7,125,200.00	92%
18.006	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	150,000,000.00	147,052,767.00	2,947,233.00	98%
18.009	Pelatihan Pengurus Koperasi	50,000,000.00	42,101,000.00	7,899,000.00	84%
18.015	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung	75,000,000.00	74,549,850.00	450,150.00	99%
18.019	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	150,000,000.00	130,382,000.00	19,618,000.00	87%
19	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	338,288,000.00	195,486,400.00	142,812,000.00	55.83%
19.002	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	150,000,000.00	109,870,400.00	40,129,600.00	73%
19.005	Pendataan Wirausaha Baru	200,000,000.00	85,616,000.00	114,384,000.00	43%
Jumlah		5,562,891,048.00	4,283,917,794.00	1,278,973,254.00	77.01%



Lampiran

TINGKAT EFEKTIFITAS ANGGARAN PER SASARAN
DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	% REALISASI ANGGARAN	% FISIK	% Tingkat Efektivitas
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	55.60%	85%	29.25%
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan Bina Koperasi Koperasi Melakukan RAT	94.79%	100.00%	0.00%
2	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	68.81%	98.78%	29.97%

SASARAN PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	% REALISASI ANGGARAN	% FISIK	% Tingkat Efektivitas
1	Meningkatnya Transparansi dan kuntabilitas Kinerja koperasi dan UKM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85.23%	97%	11.61%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	82.30%	97%	15.10%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai kinerja SKP	62.99%	100%	37.01%
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	77.51%	100%	22.49%
2	Meningkatnya Wirausaha Baru	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	55.85%	96.67%	40.81%



TINGKAT EFEKTIFITAS ANGGARAN PER KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Keuangan	% Fisik	% Tingkat Efektivitas
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.804.288.197.00	1.537.813.884.00	85.23%	97%	11.61%
01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.278.695.00	121.116.508.00	91%	100%	9.13%
01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.850.900.00	6.363.430.00	47%	65.22%	18.60%
01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor	140.000.000.00	139.847.620.00	100%	100%	0.11%
01.006	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000.00	69.712.500.00	100%	100%	0.41%
01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000.00	45.713.000.00	91%	100%	8.57%
01.010	Penyediaan bahan logistik kantor	20.000.000.00	19.783.650.00	99%	100%	1.08%
01.011	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000.00	30.440.000.00	76%	100%	23.90%
01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	359.080.000.00	301.271.125.00	84%	100%	16.10%
01.015	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000.00	1.200.000.00	100%	100%	0.00%
01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000.00	233.795.490.00	94%	100%	6.48%
01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	727.059.502.00	568.570.571.00	78%	100%	21.80%
02	Program Peningkatan Basis dan Prasarana Aparatur	628.211.851.00	510.407.190.00	82.30%	88%	15.10%
02.001	Pengadaan peralatan gedung	120.263.800.00	108.417.000.00	90%	90%	0.00%
02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125.000.000.00	121.456.820.00	97%	100%	2.83%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118.800.000.00	81.545.000.00	69%	97%	28.36%
02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70.000.000.00	26.532.500.00	38%	100%	61.53%
02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	186.147.851.00	172.055.870.00	92%	100%	7.57%
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000.00	62.987.000.00	62.99%	100%	37.61%
05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	50.000.000.00	22.764.080.00	46%	100%	54.47%
05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	50.000.000.00	40.223.000.00	80%	100%	19.55%
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	885.881.288.00	488.427.363.00	77.51%	100%	22.48%
06.009	Publikasi Perencanaan Pembangunan	78.518.200.00	78.518.200.00	100%	100%	0.00%
06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website	30.000.000.00	10.304.700.00	34%	100%	65.65%
06.020	Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	21.783.000.00	10.182.000.00	47%	100%	53.26%
06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	190.000.000.00	121.365.263.00	64%	100%	36.12%
06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	191.373.800.00	169.493.200.00	89%	100%	11.43%
06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	93.928.200.00	79.564.200.00	85%	100%	15.29%
10	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452.818.000.00	311.984.758.00	68.91%	98.78%	28.97%
10.001	Pengujian Kapasitas Kelembagaan UMK	85.000.000.00	30.802.700.00	36%	36%	-0.24%



16.004	Pendataan UMK Tani dan Nelayan	67,810,000.00	66,640,000.00	98%	100%	1.73%
16.005	Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan	150,000,000.00	145,608,800.00	97%	100%	2.93%
16.011	Pendampingan Penerbitan IUMK	150,000,000.00	68,513,250.00	46%	89%	43.21%
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	890,000,000.00	494,820,000.00	55.60%	85%	29.25%
17.001	Facilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	115,000,000.00	88,981,000.00	77%	100%	22.64%
17.003	Facilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	115,000,000.00	67,701,000.00	59%	100%	41.13%
17.006	Facilitasi LPD menjadi KSPAUSP-koperasi	485,000,000.00	183,243,000.00	38%	100%	62.22%
17.007	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	75,000,000.00	55,531,000.00	74%	100%	25.96%
17.009	Pengembangan Usaha Koperasi	100,000,000.00	99,384,000.00	99%	100%	0.62%
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	740,000,000.00	701,418,000.00	94.79%	100.00%	5.21%
18.001	Pendampingan dan money RAT Koperasi	225,000,000.00	224,450,500.00	100%	100%	0.24%
18.002	Facilitasi Pembiayaan Koperasi	90,000,000.00	82,874,800.00	92%	100%	7.92%
18.006	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	150,000,000.00	147,052,767.00	98%	99%	0.96%
18.009	Pelatihan Pengurus Koperasi	50,000,000.00	42,101,000.00	84%	100%	15.80%
18.015	Facilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung	75,000,000.00	74,549,850.00	99%	100%	0.60%
18.019	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	150,000,000.00	130,382,000.00	87%	100%	13.08%
19	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	350,000,000.00	195,486,400.00	55.85%	96.67%	40.81%
19.002	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	150,000,000.00	109,870,400.00	73%	100%	26.75%
19.005	Pendataan Wirausaha Baru	200,000,000.00	85,616,000.00	43%	100%	57.18%
Jumlah		5,562,891,048.00	4,283,917,794.00	77.01%	91%	13.76%